

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten 2017 mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan RKPD 2017 ditunjukkan oleh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten.

2.2.1 Capaian Kinerja RPJMD

Pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2017 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017, dimana keberhasilan pembangunan pada Tahun tersebut dapat ditunjukkan oleh realisasi indikator kinerja dalam menjawab target-target yang sudah ditentukan. Realisasi indikator kinerja ditunjukan oleh tabel berikut:

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Program
Provinsi Banten 2017

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pelayanan Dasar, Bukan Pelayanan Dasar, Pilihan, dan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100,00	100,00	100,00	42 Perangkat Daerah
		Rasio ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100,00	100,00	100,00	42 Perangkat Daerah
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100,00	100,00	100,00	43 Perangkat Daerah
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100,00	100,00	100,00	43 Perangkat Daerah
		Rasio Pembangunan, Pengadaan,	100,00	100,00	100,00	42 Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur				
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100,00	100,00	100,00	43 Perangkat Daerah
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
Bidang Pendidikan						
4	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	65,92	75,89	115,12	Disdikbud
		APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	99,95	97,56	97,61	Disdikbud
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	100,00	91,14	91,14	Disdikbud
5	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Rata -rata Lama Sekolah (tahun)	9,65	8,43	87,36	Disdikbud
		Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	10,00	9,50	95,00	Disdikbud
Bidang Kesehatan						
7	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	86,00	72,05	83,78	Dinkes
		Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	92,00	82,00	89,13	Dinkes
		Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)	92,50	77,00	83,24	Dinkes
9	Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	77,00	75,00	97,40	Dinkes
		Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin	100,00	100,00	100,00	Dinkes

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		(%)				
		Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	100,00	100,00	100,00	Dinkes
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	100,00	100,00	100,00	Dinkes
		Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED	100,00	100,00	100,00	Dinkes
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)	100,00	100,00	100,00	RSUD Banten
		Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)	70,00	70,00	100,00	RSUD Banten
11	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan	100,00	80,10	80,10	Dinkes
		Prevalensi HIV (%)	<0,5	0,03	100,00	Dinkes

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	92,00	84,00	91,30	Dinkes
		Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	<1	<1	100,00	Dinkes
		Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	60,00	100,00	166,67	Dinkes
		Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	79,00	76,50	96,84	Dinkes
8	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100,00	93,74	93,74	Dinkes
		Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	80,00	80,00	100,00	Dinkes
10	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (%)	100,00	96,97	96,97	Dinkes
		Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (Unit)	222 Unit	222 Unit	100,00	Dinkes
		Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)	60 Unit	161 Unit	268,33	Dinkes
		Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	100,00	0,00	0,00	Dinkes
		Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk	100,00	100,00	100,00	Dinkes

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		miskin peserta program Jamkesmas (%)				
		Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	27 Orang	28 Orang	103,70	RSUD Malingping
12	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja	200 Industri	332 Industri	166,00	Dinkes
		Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	80,00	80,00	100,00	Dinkes
		Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100,00	100,00	100,00	RSUD Malingping
		Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis	200 Orang	1.200 Orang	600,00	RSUD Malingping
		Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)	90,00	90,00	100,00	RSUD Banten
		Terselenggaranya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	100,00	100,00	100,00	RSUD Banten
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
13	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100,00	84,28	84,28	DPUPR
		Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	96,00	83,00	86,46	DPUPR

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
15	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	12,11	11,80	97,44	DPUPR
		Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)	5.151,1 Ha	4.734 Ha	91,90	DPUPR
14	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1 Paket	1 Paket	100,00	DPUPR
		Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	2,50	2,50	100,00	DPUPR
		Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	BAPPEDA
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
17	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m³)	1.983,75 m3	734,40 m3	37,02	DPRKP
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	113 Lokasi	71 Lokasi	62,83	DPRKP
		Penyelesaian Gedung KP3B	1 Gedung	1 Gedung	100,00	DPRKP
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3 Gedung	3 Gedung	100,00	DPRKP
16	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)	20,00	6,40	32,00	DPRKP
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
23	Pembinaan, kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan Pembinaan lembaga yang sadar politik	363 Lembaga	363 Lembaga	100,00	Badan Kesbangpol
		Cakupan Pembinaan Lembaga Yang Terbina Sadar Kerukunan	426 Lembaga	426 Lembaga	100,00	Badan Kesbangpol

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol
24	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
		Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100,00	98,18	98,18	Satpol PP
		Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
		Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
25	Penanggulangan Bencana	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%)	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Pelaksanaan Monitoring Rekontruksi Fisik di Kab. Lebak	100,00	60,00	60,00	BPBD
Bidang Sosial						
27	Penanganan Kemiskinan	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial	1.420 KK	1.420 KK	100,00	Dinsos

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diberdayakan	1.370 KK	1.370 KK	100,00	Dinsos
29	Rehabilitasi Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi	3.500 Orang	3.500 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi	2.210 Orang	2.210 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang direhabilitasi	530 Orang	530 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Lembaga sosial anak yang dibina	40 Lembaga	40 Lembaga	100,00	Dinsos
		Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi	680 Orang	680 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)	307 Orang	307 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	550 Orang	550 Orang	100,00	Dinsos
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang)	366 Orang	366 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang)	6.300 Orang	6.300 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang)	1.452 Orang	1.452 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang)	366 Orang	366 Orang	100,00	Dinsos

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
26	Pemberdayaan Sosial	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)	400 Orang	400 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	604 Orang	604 Orang	100,00	Dinsos
		Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan	640 Orang	640 Orang	100,00	Dinsos
		Cakupan Kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00	Biro Kesra
		Cakupan kelembagaan kelompok/badan/Lembaga/Oranganisasi keagamaan yang terfasilitasi	600 Lembaga	600 Lembaga	100,00	Biro Kesra
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
Bidang Ketenagakerjaan						
30	Pengembangan kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	5,17	5,10	98,57	Disnakertrans
31	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunannya (%)	10,06	10,06	100,00	Disnakertrans
32	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Cakupan Kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja	688 Orang	1.812 Orang	263,37	Disnakertrans
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
34	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	1 Kab/Kota	2 Kab/Kota	200,00	DP3AKKB

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja Lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Lembaga lainnya (%)	20,00	20,00	100,00	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
		Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS ,GSI,APE) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
		Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)	100,00	100,00	100,00	DP3AKKB
Bidang Pangan						
35	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan yang cukup, aman dan merata	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	Dinas Ketapang
		Ketersediaan dokumen kebijakan infrastruktur dan pemberdayaan pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Dinas Ketapang
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100,00	Dinas Ketapang
		Ketersediaan dokumen pasokan dan harga pangan lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Dinas Ketapang

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP)	200 Ton	125,67 Ton	62,84	Dinas Ketapang
		Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin/Rastra	100,00	100,00	100,00	Dinas Ketapang
		Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat (CPP dan CPM)	807 Ton	780,10 Ton	96,67	Dinas Ketapang
		Jumlah Lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	82 Lembaga a	112 Lembaga	136,59	Dinas Ketapang
		Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat (Skor PPH)	96,00	85,70	89,27	Dinas Ketapang
		Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)	80,00	80,00	100,00	Dinas Pertanian
Bidang Lingkungan Hidup						
36	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	20,00	20,00	100,00	DLHK
		Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	20,00	20,00	100,00	DLHK
38	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8.000 Ha	5.236 Ha	65,45	DLHK
		Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20,00	20,00	100,00	DLHK
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
44	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan	100,00	100,00	100,00	DPMD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		masyarakat desa/kelurahan				
		Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)	13,00	13,00	100,00	DPMD
		Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasaryakatan Teknologi Tepat Guna	2 PosyanteK	10 PosyanteK	500,00	DPMD
		Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)	100,00	100,00	100,00	DPMD
		Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)	5,00	5,00	100,00	DPMD
		Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%)	6,38	6,38	100,00	DPMD
		Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)	6 Desa/Kel	5 Desa/Kel	80,81	DPMD
		Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa	1.261 Desa	1.238 Desa	98,18	DPMD
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
33	Kependudukan dan Keluarga Berencana	Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana	890,00	890,00	100,00	DP3AKKB

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		(orang)				
		Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100,00	57,78	57,78	DP3AKKB
Bidang Perhubungan						
45	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	48,91	48,91	100,00	Dinas Perhubungan
		Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017	60,63	59,30	97,81	Dinas Perhubungan
Bidang Komunikasi dan Informatika						
46	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%)	100,00	98,52	98,52	Diskominfo SP
		Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	75,00	75,00	100,00	Diskominfo SP
		Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	75,00	75,00	100,00	Diskominfo SP
		Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100,00	100,00	100,00	Diskominfo SP

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
48	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	18,28	18,28	100,00	Dinkop UKM
		Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	18,28	18,28	100,00	Dinkop UKM
47	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	29,00	29,00	100,00	Dinkop UKM
		Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	29,00	29,00	100,00	Dinkop UKM
49	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas kelembagaan dan SDM K-UMKM	Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	20,66	20,66	100,00	Dinkop UKM
		Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)	20,66	20,66	100,00	Dinkop UKM
Bidang Penanaman Modal						
50	Peningkatan Iklim Investasi	Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	15,00	15,00	100,00	DPMPTSP
51	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	10,34 Triliyun	40,68 Triliyun	393,00	DPMPTSP
		Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	4,47 Triliyun	15,14 Triliyun	339,00	DPMPTSP
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						
52	Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah Organisasi pramuka yang mendapatkan	9 Kwartir	9 Kwartir	100,00	Dispora

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		pelayanan Kepramukaan (Kwartir)				
		Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)	10 Kelomp ok	25 Kelompok	250,00	Dispora
53	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (Event)	20 cabor/ 18 event	19 cabor/ 17 event	94,72	Dispora
		Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (Unit)	1 unit	1 unit	100,00	Dispora
Bidang Statistik						
3	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	40 Paket	40 Paket	100,00	40 Perangkat Daerah
Bidang Kebudayaan						
6	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)	20,00	18,00	90,00	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)	15,00	14,00	93,33	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)	20,00	18,00	90,00	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)	20,37	19,00	93,27	Disdikbud
		Meningkatnya Jumlah Pengunjung Museum	20,00	18,00	90,00	Disdikbud
Bidang Perpustakaan						
61	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	500 (100%)	500 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	125 (100%)	125 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
60	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	42 (100%)	42 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Bidang Kearsipan						
59	Pembinaan Kearsipan Daerah	Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	41 (100%)	41 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	41 (100%)	41 (100%)	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan						
Bidang Kelautan dan Perikanan						
42	Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Luas Areal Konservasi Laut (Ha)	1 Ha	1 Ha	100,00	DKP
		Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)	12 Kasus	13 Kasus	108,33	DKP
Bidang Pariwisata						
68	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata (%)	20,00	20,00	100,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%)	23,08	23,08	100,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%)	20,00	20,00	100,00	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri (%)	20,11	20,11	100,00	Dinas Pariwisata
69	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan Lembaga/instansi pemerintah (%)	20,00	20,00	100,00	Dinas Pariwisata

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)	19,67	19,67	100,00	Dinas Pariwisata
		Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)	18,75	18,75	100,00	Dinas Pariwisata
Bidang Pertanian						
43	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2.396.699 Ton	2.405.501 Ton	100,37	Dinas Pertanian
		Surplus Beras (ton)	88.270 Ton	102.314 Ton	115,91	Dinas Pertanian
		Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	34.000 Ha	90.205 Ha	265,31	Dinas Pertanian
		Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	100.000 Ha	128.600 Ha	128,60	Dinas Pertanian
		Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	28.263 Ton	44.209 Ton	156,42	Dinas Pertanian
		Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	37.069,66 Ton	55.729,84 Ton	150,34	Dinas Pertanian
		Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)	500 Ha			DLHK
		Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (Unit)	3 Unit	3 Unit	100,00	DLHK
		Jumlah Unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (Unit)	1 Unit			DLHK
		cakupan ketersediaan sarana dan prasarana	3 Unit			DLHK

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		pendukung pengembangan perkebunan (Unit)				
		Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	107.000 Batang	200.000 Batang	186,92	DLHK
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	70.050 Ton	56.222 Ton	80,26	DKP
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	>100	106,77	106,00	DKP
		Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)	1,7 Milyar	6 Milyar	342,00	DKP
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	190.000 Ton	105.426 Ton	55,49	DKP
41	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,00	99,73	94,98	Dinas Pertanian
		Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (Unit)	3 Unit	4 Unit	133,33	Dinas Pertanian
		Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (Unit)	11 Unit	11 Unit	100,00	Dinas Pertanian
		Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (Unit)	6 Unit	6 Unit	100,00	DLHK
		Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (Unit)	250 Unit	250 Unit	100,00	DLHK
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,85	0,53	62,35	DKP
		Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)	5.000 Ton	4.122 Ton	82,44	DKP

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)	30 Kg/Kapita	33 Kg/Kapita	110,00	DKP
39	Pemberdayaan kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan kelembagaan Pertanian (Unit)	5 Unit	5 Unit	100,00	Dinas Pertanian
		Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (Unit)	30 Unit	30 Unit	100,00	Dinas Pertanian
		Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (Unit)	2 Unit	2 Unit	100,00	Dinas Pertanian
		Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (Unit)	30 Unit	26 Unit	86,67	Dinas Pertanian
40	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	Cakupan ketersediaan Traktor (Unit)	200 Unit	228 Unit	114,00	Dinas Pertanian
		Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (Unit)	5 Unit	11 Unit	220,00	Dinas Pertanian
		Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)	4.000 Ha	1.500 Ha	37,50	Dinas Pertanian
Bidang Kehutanan						
37	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan	Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (Unit)	6 Unit	6 Unit	100,00	DLHK
		Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)	10 Kelompok	15 Kelompok	150,00	DLHK
Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral						
63	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan	7.045 SS	6.903 SS	97,98	Dinas ESDM

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Sambungan Rumah Terpasang (SS)				
		Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)	2 Unit	2 Unit	100,00	Dinas ESDM
		Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	100,00	100,00	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi (Dokumen)	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan keterselenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi (Laporan)	17 Laporan	17 Laporan	100,00	Dinas ESDM
62	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen)	13 Dokumen	13 Dokumen	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (Unit)	31 Unit	31 Unit	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan ketersediaan sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air bersih (lokasi)	5 Lokasi	5 Lokasi	100,00	Dinas ESDM

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan keterselenggaranya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	7 Laporan	7 Laporan	100,00	Dinas ESDM
64	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)	193 Ijin	193 Ijin	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (Paket)	1 Paket	1 Paket	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan keterfasilitasinya Pameran untuk Promosi Produk dan Potensi Pertambangan dan Energi (Kegiatan)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	Dinas ESDM
		Cakupan keterselenggaraannya Sosialisasi dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi (Laporan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	Dinas ESDM
Bidang Perdagangan						
65	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
Bidang Industri						
66	Peningkatan Daya Saing Industri	Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
		Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
		Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
		Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)	20,00	20,00	100,00	Disperindag
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
Bidang Administrasi Pemerintahan						
55	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	100,00	98,88	98,88	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD	100,00	63,72	63,72	Sekretariat DPRD
		Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD	100,00	88,88	88,88	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	100,00	99,77	99,77	Sekretariat DPRD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100,00	80,11	80,11	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
22	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%)	100,00	95,83	95,83	Biro Pemerintahan, Biro ARTP, Biro Umum
		Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%)	100,00	100,00	100,00	Biro BISDA
		Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Biro Adpem
		terserenggara layanan barang dan jasa secara terpusat	100,00	100,00	100,00	Biro Adpem
		rasio ketersediaan dokumen ketatausahaan Biro	100,00	100,00	100,00	Biro Adpem
		Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%)	100,00	100,00	100,00	Diskominfo SP
		Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%)	100,00			Biro Bina Perekonomian
		Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah	15 Unit			Biro Bina Perekonomian
		Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	10 Dokumen	5 Dokumen	50,00	Biro Bina Perekonomian

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi	100,00	100,00	100,00	Badan Penghubung
		Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100,00	100,00	100,00	Badan Penghubung
		Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi	100,00	100,00	100,00	Badan Penghubung
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00	Biro Kesra
58	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	20,00	20,00	100,00	Biro Hukum
		Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)	100,00	100,00	100,00	Biro Hukum
56	Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Rasio ketersediaan Dokumen penataan kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%)	100,00	95,00	95,00	Biro Organisasi
Bidang Pengawasan						
70	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%)	100,00	95,00	95,00	INSPEKTORAT
Bidang Perencanaan						
19	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan Dokumen perencanaan dan	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		penganggaran pembangunan (%)				
18	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA
		Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%)	100,00	100,00	100,00	Biro Adpem
21	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	3 dokum en	3 dokumen	100,00	BAPPEDA, Biro Pemerintahan
		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100,00	83,33	83,33	Biro Pemerintahan
Bidang Keuangan						
54	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	4.431 T	5.695 T	129,00	BAPENDA
		Ketersediaan jumlah sistem/data/Dokum en/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (Unit)	2 Unit	2 Unit	100,00	BAPENDA, BPKAD
		Ketersediaan Sistem/Data/Inform asi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit)	3 Unit	3 Unit	100,00	BAPENDA, BPKAD
		Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	100,00	BAPENDA, BPKAD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100,00	100,00	100,00	BAPENDA, BPKAD
57	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%)	100,00	31,66	31,66	Biro Umum
		Persentase Pengelolaan Perlengkapan Asset	100,00	100,00	100,00	BPKAD
		Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)	7.256 T			BPKAD
Bidang Kepegawaian						
71	Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%)	100,00	100,00	100,00	BKD
		Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%)	100,00	95,00	95,00	BKD
		Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur. (%)	100,00	95,00	95,00	BKD
Bidang Pendidikan dan Pelatihan						
67	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur .(%)	100,00	96,29	96,29	BPSDM
		Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur .(%)	100,00	100,00	100,00	BPSDM
Bidang Penelitian dan Pengembangan						
20	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Ketersediaan Dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA
	71 Program	254 Indikator	Rata-rata (%)		108,30	43 PD

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah diatas secara umum pelaksanaan kinerja program sudah berjalan baik, namun masih terdapat 15 indikator kinerja program yang belum tercapai, kondisi tersebut karena beberapa permasalahan yang akan dijelaskan pada sub bab 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

Tabel 2.16
Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBD
Tahun Anggaran 2018

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi TW I TA 2018	
			Fisik	Keuangan
1	Badan Kependidikan Daerah	26.846.714.000	14.08	11.39
2	Badan Kesbangpol	23.656.362.000	13.76	12.92
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.641.985.500	18.12	13.03
4	Badan Pendapatan Daerah	262.910.514.000	15.87	13.60
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.946.759.806.528	2.47	2.47
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.890.963.000	13.84	9.97
7	Badan Penghubung	10.302.880.000	26.50	20.36
8	Badan Perencanaan Pembangunan	62.154.400.000	14.79	11.57
9	Biro Administrasi Pembangunan	8.945.000.000	16.66	14.76
10	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	41.422.852.000	13.88	5.51
11	Biro Infrastruktur	2.384.210.000	14.71	14.24
12	Biro Perekonomian	3.880.000.000	16.32	9.48
13	Biro Hukum	4.247.257.000	25.84	20.11
14	Biro Kesra	5.947.186.000	15.70	9.61
15	Biro Organisasi	2.719.438.000	12.52	5.07

16	Biro Pemerintahan	2.816.260.000	21.46	7.19
17	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	49.746.832.000	11.64	10.58
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.776.220.200	12.24	11.45
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	44.599.800.000	13.32	5.88
20	Dinas Kesehatan RSUD Banten RSUD Malingping	203.747.378.000 263.581.241.931 77.534.174.069	2.12 11.10 13.61	2.29 6.61 6.90
21	Dinas Ketahanan Pangan	23.519.207.000	22.47	15.18
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.800.074.800	20.24	10.22
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	52.995.396.500	15.51	6.42
24	Dinas Koperasi dan UMKM	27.650.973.200	2.60	2.60
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66.501.100.000	15.96	14.95
26	Dinas Pariwisata	31.261.920.000	13.05	12.69
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.038.400.000	11.36	9.69
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	40.613.841.000	9.11	8.59
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.685.775.000	11.46	4.20
30	Dinas Pendidikan	1.898.308.177.909	14.05	10.31
31	Dinas Perhubungan	77.077.000.000	14.56	7.08
32	Dinas Perindustrian	117.371.093.080	6.34	3.63

	dan Perdagangan			
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	31.133.270.000	21.65	12.17
34	Dinas Pertanian	83.392.038.000	19.50	12.26
35	Dinas Sosial	49.295.680.000	12.16	11.22
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	482.357.545.000	4.21	1.03
37	Inspektorat	51.892.076.000	14.67	12.05
38	Satpol PP	28.358.400.000	16.44	15.71
39	Sekretariat DPRD	733.578.000.000	18.20	17.23
40	Biro Umum	143.719.959.000	17.01	16.56
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.399.559.844.000	1.595	0.707

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum realisasi fisik dan keuangan yang paling rendah yaitu 1.59% dan 0.707%, dan yang paling tinggi realisasinya yaitu Badan Penghubung dengan realisasi fisik 26.50% dan realisasi keuangan 20.36%.

Rencana Pembangunan di Provinsi Banten tidak hanya didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari APBN. Adapun perkembangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Rekapitulasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
Menurut Perangkat Daerah
Triwulan IV Tahun 2017

No	Perangkat Daerah	Pagu	Penyerapan (Rp)		Penyerapan (Fisik)	
1	BAPPEDA Provinsi Banten	583.546.000,00	100 100	92,00 92,00	100 100	95,50 95,50
2	Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Banten	429.052.000,00	100	56,60	100	60,10
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	2.048.111.000,00	100	87,14	100	90,64
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	3.209.321.000,00	100	99,29	100	100
5	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	32.956.499.000,00	100	86,18	100	89,68
6	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	24.750.180.000,00	100	99,83	100	100
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten	3.293.519.000,00	100	99,15	100	100
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	1.354.760.000,00	100	94,54	100	98,04
9	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1.719.200.000,00	100	80,79	100	84,29
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	27.508.220.000,00	100	86,60	100	90,10
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	2.300.000.000,00	100	97,71	100	100
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten	300.000.000,00	100	94,54	100	98,04
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	17.078.445.000,00	100	94,89	100	98,39
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten	2.756.129.000,00	100	96,55	100	100
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	1.166.191.000,00	100	94,10	100	97,60
16	Dinas Pertanian Provinsi Banten	26.465.940.000,00	100	97,89	100	100
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi	874.211.000,00	100	78,21	100	81,71

	Banten					
18	Dinas Sosial Provinsi Banten	16.971.858.000,00	100	98,43	100	100
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	6.960.080.000,00	100	87,83	100	91,33
	TOTAL	172.725.262.000,00	100	92,94	100	96,44

Dari tabel di atas realisasi dana dekonsentrasi sudah cukup baik, untuk realisasi keuangan sebesar 92.94% dan realisasi fisik sebesar 96.44%.

Berikut ini Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018:

Tabel 2.18
 Rekapitulasi Alokasi Dekonsentrasi Provinsi Banten
 Tahun Anggaran 2018

Perangkat Daerah/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	2.200.000.000,00	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	304.900.000,00	-	-
BAPPEDA Provinsi Banten	1.026.431.000,00	-	-
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten	2.609.274.000,00	-	-
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Banten	3.352.342.000,00	-	-
Dinas Kesehatan Provinsi Banten	28.056.802.000,00	156.195.000,00	0.56
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	17.362.900.000,00	3.156.224.989,00	18.18
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten	3.510.232.000,00	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten	1.315.259.000,00	-	-
Dinas Pariwisata Provinsi Banten	2.369.665.000,00	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	30.432.189.000,00	1.961.276.190,00	6.44

Banten			
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten	953.008.000,00	-	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	12.264.718.000,00	2.296.000,00	0.02
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten	2.866.565.000,00	-	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	1.028.568.000,00	-	-
Dinas Pertanian Provinsi Banten	19.119.151.000,00	532.900.000,00	2.79
Dinas Sosial Provinsi Banten	18.889.672.000,00	-	-
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten	5.453.463.000,00	-	-
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten	223.940.000,00	-	-
Total	153.339.079.000,00	5.804.300.179,00	3.79

Dari tabel tersebut penyerapan Triwulan I TA 2018 masih rendah (3.79%) dari pagu Rp153.339.079.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.804.300.179,00

Tabel 2.19
Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			Rp	(%)
1	DEKONSENTRASI	153.339.079.000,00	5.804.300.179,00	3,79
2	DESENTERALISASI	1.570.105.138.000,00	47.876.639.400,00	3,05
	- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	629.188.785.000,00	-	-
	- DANA DESA	940.916.353.000 ,00	47.876.639.400,00	5,09
3	KANTOR DAERAH	7.598.890.960.000,00	533.500.811.386,00	7,02
4	KANTOR PUSAT	1.703.155.695.000,00	44.775.053.066,00	2,63
5	TUGAS PEMBANTUAN	213.851.276.000,00	1.390.458.297,00	0,65
Grand Total		11.239.342.148.000,00	633.347.262.328,00	5,64

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2017 telah melaksanakan 35 bidang urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 15 Urusan

Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 71 program dan 1.109 kegiatan yang dilaksanakan oleh 43 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang 22 program dan 307 kegiatan yang tersebar di 11 (sebelas) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD Malingping; RSUD Banten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp2.355.073.727.839,00 dan realisasi sebesar Rp1.935.179.191.946,00 atau sebesar 82,17% dengan realisasi fisik sebesar 94,64%. Adapun Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, sebagai berikut :

2.3.1.1 Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan didukung oleh 4 program dan 50 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp592.449.296.232,00 dan realisasi sebesar Rp490.219.131.468,00 atau sebesar 82,74% dengan realisasi fisik sebesar 86,37%.

2.3.1.2 Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan didukung oleh 8 program dan 66 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan

Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp394.646.517.690,00 dan realisasi sebesar Rp293.677.690.064,00 atau sebesar 74,42% dengan realisasi fisik sebesar 93,26%.

2.3.1.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 84 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.001.898.774.684,00 dan realisasi sebesar Rp903.624.178.223,00 atau sebesar 90,19% dengan realisasi fisik sebesar 94,32%.

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, adalah:

2.3.1.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 29 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp256.470.604.638,00 dan realisasi sebesar Rp144.205.431.394,00 atau sebesar 56,23% dengan realisasi fisik sebesar 90,99%.

2.3.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 5 program dan 47 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp62.912.608.000,00 dan realisasi sebesar Rp57.532.443.425,00 atau sebesar 91,45% dengan realisasi fisik sebesar 97,60%.

2.3.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung oleh 6 program dan 31 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp46.695.926.595,00 dan realisasi sebesar Rp45.920.317.372,00 atau sebesar 98,34% dengan realisasi fisik sebesar 99,85%.

2.3.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan 15 Urusan Bidang 25 program dan 290 kegiatan yang tersebar di 40 (empat puluh) Perangkat Daerah, sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah lainnya tidak melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah : RSUD Malingping, RSUD Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp361.175.238.217,00 dan realisasi sebesar Rp324.918.285.875,00 atau sebesar 89,96% dengan realisasi fisik sebesar 90,42%.

2.3.2.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan didukung oleh 5 program dan 25 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp63.628.690.600,00 dan realisasi sebesar Rp55.406.482.806,00 atau sebesar 87,08% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.194.733.600,00 dan realisasi sebesar Rp13.054.070.140,00 atau sebesar 91,96% dengan realisasi fisik sebesar 99,07%.

2.3.2.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp9.838.485.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.143.252.523,00 atau sebesar 92,93% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.2.4 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup didukung oleh 4 program dan 39 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp42.713.347.250,00 dan realisasi sebesar Rp39.625.790.500,00 atau sebesar 92,77% dengan realisasi fisik sebesar 99,36%.

2.3.2.5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp8.677.192.800,00 dan realisasi sebesar Rp7.391.717.850,00 atau sebesar 85,19% dengan realisasi fisik sebesar 98,07%.

2.3.2.6 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.951.566.200,00 dan realisasi sebesar Rp2.243.011.264,00 atau sebesar 75,99% dengan realisasi fisik sebesar 87,45%.

2.3.2.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan didukung oleh 3 program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp56.548.788.215,00 dan realisasi sebesar Rp53.259.341.889,00 atau sebesar 94,18% dengan realisasi fisik sebesar 98,41%.

2.3.2.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp40.976.956.153,00 dan realisasi sebesar Rp36.373.395.158,00 atau sebesar 88,77% dengan realisasi fisik sebesar 98,40%.

2.3.2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 23 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.025.619.550,00 dan realisasi sebesar Rp14.802.718.871,00 atau sebesar 86,94% dengan realisasi fisik sebesar 98,87%.

2.3.2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal didukung oleh 4 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp20.855.061.750,00 dan realisasi sebesar Rp17.539.661.856,00 atau sebesar 84,10% dengan realisasi fisik sebesar 90,01%.

2.3.2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 4 program dan 26 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp39.513.373.900,00 dan realisasi sebesar Rp36.953.791.234,00 atau sebesar 93,52% dengan realisasi fisik sebesar 97,81%.

2.3.2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik didukung oleh 1 program dan 41 kegiatan yang dilaksanakan pada 40 Perangkat Daerah Provinsi Banten, sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah lainnya yang tidak melaksanakan Urusan di Bidang Statistik adalah RSU Malingping dan RSUD Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.773.347.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.384.550.378,00 atau sebesar 80,93% dengan realisasi fisik sebesar 97,42%.

2.3.2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp7.029.378.049,00 dan realisasi sebesar Rp6.540.063.400,00 atau sebesar 93,04% dengan realisasi fisik sebesar 96,00%.

2.3.2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan didukung oleh 4 program dan 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.852.965.650,00 dan realisasi sebesar Rp14.773.785.006,00 atau sebesar 93,19% dengan realisasi fisik sebesar 98,87%.

2.3.2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.595.732.500,00 dan realisasi sebesar

Rp3.426.653.000,00 atau sebesar 95,30% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 15 program dan 189 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan sebesar Rp137.159.121.419,00 dan realisasi sebesar Rp125.288.963.312,00 atau sebesar 91,35% dengan realisasi fisik sebesar 97,88%.

2.3.3.1 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 3 program dan 30 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.867.814.050,00 dan realisasi sebesar Rp12.886.214.027,00 atau sebesar 81,21% dengan realisasi fisik sebesar 94,25%.

2.3.3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp21.490.544.470,00 dan realisasi sebesar Rp19.608.547.122,00 atau sebesar 91,24% dengan realisasi fisik sebesar 95,25%.

2.3.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 6 program dan 78 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.983.086.124,00 dan realisasi sebesar Rp47.263.987.082,00 atau sebesar 94,56% dengan realisasi fisik sebesar 98,32%.

2.3.3.4 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.016.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp971.512.500,00 atau sebesar 95,62% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.3.5 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp30.256.976.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.932.350.780,00 atau sebesar 89,01% dengan realisasi fisik sebesar 99,74%.

2.3.3.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 1 program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.801.070.950,00 dan realisasi sebesar Rp3.541.279.846,00 atau sebesar 93,17% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.3.7 Urusan Pilihan Bidang Industri

Pada Urusan Pilihan Bidang Industri didukung oleh 3 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.743.629.825,00 dan realisasi sebesar Rp14.085.071.955,00 atau sebesar 95,53% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7 Urusan Bidang 15 program dan 323 kegiatan yang tersebar di 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penghubung, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah,

Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp718.349.233.721,00 dan realisasi sebesar Rp586.327.145.530,00 atau sebesar 81,62% dengan realisasi fisik sebesar 97,35%. Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, sebagai berikut :

2.3.4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan didukung oleh 6 program dan 144 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Perekonomian, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp393.291.522.074,00 dan realisasi sebesar Rp353.474.491.952,00 atau sebesar 89,88% dengan realisasi fisik sebesar 97,60%.

2.3.4.2 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.932.228.652,00 dan realisasi sebesar Rp46.308.207.555,00 atau sebesar 92,74% dengan realisasi fisik sebesar 98,96%.

2.3.4.3 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.399.387.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.039.748.000,00 atau sebesar 60,00% dengan realisasi fisik sebesar 87,32%.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Bidang Pendidikan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Permasalahan khusus yang terjadi terkait pelaksanaan kegiatan dengan serapan rendah yaitu :

1. Pada Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran rendah disebabkan adanya efisiensi, meliputi : Efisiensi sisa kontrak atas pengadaan barang dan jasa, akomodasi sewa Kamar/Tempat Penginapan dan uang saku peserta, Belanja Listrik dan Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, belanja makan minum, Telepon/Faksimili/Internet, listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, dan adanya keterlambatan administrasi;
2. Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun pada Kegiatan yang serapannya rendah, meliputi:
 - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK terdapat satu tolok ukur (pengadaan buku perpustakaan) tidak direalisasikan karena sudah tidak relevan dengan kurikulum terbaru;
 - Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pendidikan terkendala pada pengiriman peserta pelatihan bagi operator data GTK di SMK/SMA harus PNS;
 - Kegiatan Pengembangan SDM Pendidikan terdapat Efisiensi kontrak atas pengadaan Bahan US, Blanko Ijazah, dan SKHUS SD/MI, SDLB dan Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017 dan efisiensi akomodasi;

Permasalahan secara umum pada pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

1. Masih belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, sehingga sering terjadi miskomunikasi mengenai prioritas pendidikan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota semenjak diberlakukannya otonomi daerah. Salah satu contoh masalah adalah belum optimalnya komunikasi antar Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menanggapi masalah-masalah pembangunan pendidikan di tiap Kabupaten/Kota.
2. Desentralisasi pendidikan membutuhkan pembiayaan dana yang tidak kecil sehingga pembangunan pendidikan harus berakar dari masyarakat dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah. Namun demikian, di Provinsi Banten masih banyak Kabupaten/Kota yang mengandalkan bantuan atau alokasi pembangunan pendidikan dari Provinsi sehingga memperlambat upaya kemandirian daerah dalam pembangunan pendidikan;
3. Masih belum meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat khususnya di daerah pedesaan akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga penghargaan atas pendidikan sebagai investasi masa depan di kalangan sebagian masyarakat di Provinsi Banten masih sangat rendah sehingga himbauan Pemerintah untuk mensekolahkan anak didik ke jenjang yang lebih tinggi kurang mendapat respon positif dari masyarakat;
4. Jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (kekurangan daya tampung siswa);
5. Penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru tidak mudah untuk dapat dipenuhi, hal ini karena mahalnnya harga lahan, terutama di daerah perkotaan dan industri;
6. Masih banyak anak usia sekolah yang belum seluruhnya dapat bersekolah baik pada jalur Informal maupun non formal;
7. Masih banyak anak usia sekolah yang berkebutuhan Khusus belum dapat bersekolah;
8. Rasio buku dan siswa belum sesuai dengan kebutuhan (1:1);

9. Nilai rata-rata ujian sekolah masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dengan angka/jumlah lulusan yang belum mencapai 100% pada SMA dan SMK;
 10. Masih banyaknya kualifikasi pendidikan guru yang belum sesuai kelayakan mengajar, terutama tingkat pendidikan dasar;
 11. Lulusan sekolah kejuruan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dunia kerja (masih banyak lulusan sekolah kejuruan yang belum siap kerja) dan belum mampu menciptakan lulusan kejuruan yang siap untuk mandiri/menciptakan lapangan kerja sendiri (berjiwa *entreprenurship*);
 12. Sering berganti kebijakan pada penerapan kurikulum pendidikan. Kurikulum KTSP belum berjalan efektif, saat sudah berganti kembali ke Kurikulum tahun 2013 (K-13);
 13. Masih rendahnya SMP/MTs walaupun adanya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Wajib 12 Tahun;
 14. Masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah;
 15. Kekurangan tenaga pengajar dan kualifikasi pendidikan belum memadai (*mis match*);
 16. Belum baiknya sistem pengawasan pendidikan termasuk dalam menjamin kualitas pendidikan;
 17. Dukungan terhadap MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang;
 18. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
 19. Masih ada sekolah yang belum representatif sesuai dengan standar nasional;
 20. Tanah tidak sesuai dengan standar nasional, masih ada yang belum memiliki lapangan upacara dan lapangan olahraga dan perpustakaan;
 21. Dana bantuan DAK untuk tiap sekolah masih kurang dibandingkan dengan harga bahan bangunan pada saat ini.
- b. Solusi dari permasalahan umum tersebut diatas, antara lain :
1. Perlu penambahan daya tampung melalui pembangunan/penambahan ruang kelas baru;
 2. Perlu penyediaan dana yang lebih besar untuk pengadaan lahan UGB/USB baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);

3. Perlu dibangun unit sekolah baru, penambahan ruang kelas atau pembukaan kelas jauh, atau sekolah satu atap;
4. Pada jalur non formal, perlu dikembangkan program kejar paket (A, B, dan C melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (KBM);
5. Perlu adanya penambahan jumlah buku untuk rasio siswa/buku 1:1 melalui program BOS Buku dan pendampingan melalui APBD;
6. Anggaran untuk pembangunan perpustakaan dan runag penunjang lainnya dan pemenuhan media/alat pendidikan perlu ditingkatkan, baik yang bersumber dari APBD dan APBN;
7. Perlu ditingkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program diklat/penataran/lokakarya dan peningkatan/penambahan sarana prasarana PBM/KBM (media pendidikan, alat pendidikan atau alat peraga pendidikan lainnya);
8. Harus dilakukan upaya pemerataan guru, diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pendukungnya dan peningkatan kesejahteraan guru dan penyetaraan pendidikan guru ke lembaga LPTK yang telah diakui baik melalui sumber pendanaan Pemerintah Pusat dengan tugas belajar ataupun dengan swadana;
9. Perlu dioptimalkan kembali pola pendidikan sistem ganda yang ada di sekolah kejuruan melalui optimalisasi kesepakatan (MoU) antara pihak sekolah dengan dunia industri/kerja dan penyempurnaan kurikulum sekolah kejuruan yang lebih menekankan pada kebutuhan dan tuntutan *oriented life skill*;
10. Mengintensifkan kemitraan secara berkesinambungan melalui forum sosialisasi dengan membangun kapasitas stakeholders dan pembinaan manajemen pendidikan dalam berbagai diklat dengan meningkatkan tata kelola dan advokasi kelembagaan serta dengan melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang dan pembinaan SDM yang membidangi secara intensif;
11. Dana bantuan pendidikan/beasiswa dari Dinas Pendidikan bagi pendidikan dasar (SD-SMP-SMA) diupayakan adanya penambahan jumlah alokasi anggaran mengingat masih banyaknya siswa SD-SMP yang tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan tidak mampu;
12. Bantuan pendidikan/beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi dan bantuan khusus murid (BKM) bagi pendidikan menengah diupayakan

peruntukannya tidak hanya kegiatan belajar mengajar (KBM) akan tetapi dapat digunakan sebagai transport siswa, mengingat akses pendidikan menengah belum menjangkau di setiap kecamatan, sehingga siswa berpotensi putus sekolah dapat diselamatkan;

13. Perlunya kualifikasi pendidikan guru secara berkala, diklat guru mata pelajaran dan pengangkatan guru sesuai dengan kebutuhan;
14. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan melalui program terpadu monitoring dan evaluasi;
15. Meningkatkan kesiapan sekolah, kemampuan kepala sekolah dan guru, periodisasi SDM dan akreditasi lembaga dengan cara sertifikasi dan advokasi;
16. Meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan serta pengembangan networking dengan stakeholders pendidikan didanai oleh Pusat dan Provinsi;
17. Perlu perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memadai;
18. Perlu penambahan tanah atau dengan merelokasi ke tempat yang strategis dengan cara merevitalisasi gedung sekolah dasar yang lebih representatif.

2.3.2 Permasalahan Bidang Kesehatan

- a. Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, adalah:

Permasalahan

1. Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat terkait dengan Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu;
2. Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Kegiatan Pelayanan kesehatan anak untuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) sebanyak 82,00% belum tercapai dari target 90,00%, yang belum tercapai 7,60% karena Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata (tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun dan Kurang terampilnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk bersalin di tolong oleh nakes. Capaian

Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90,00%, yang belum tercapai 1,60% karena masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga sehingga kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan;

3. Kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan terkendala masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu. Dari segi Tenaga Kesehatan, masih banyak SDM yang belum terlatih;
4. Kendala yang dihadapi pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan dimana masih banyaknya sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang diperburuk karena belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi dikelompok masyarakat;
5. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang terkendala masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat/suspek terkena *vector* nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi pada Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten (*Malaria Import*);
6. Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan barang/jasa 'E-Katalog'. Pada pemesanan obat E-Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan dikarenakan kekosongan stok;
7. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Telah dilaksanakan 88,89%, diakibatkan adanya pekerjaan atau tolok ukur Penyusunan FS Pembangunan RS di Banten Selatan senilai Rp400.000.000,00 dikarenakan tidak cukup waktu pelaksanaan;
8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin melalui tolok ukur bakti sosial operasi bibir sumbing dan operasi katarak, terdapat efisiensi anggaran sesuai dengan permintaan dari

Kabupaten/Kota maupun pihak yang memerlukan kegiatan bakti sosial;

9. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja Pekerjaan Telah dilaksanakan 90,00%, adapun permasalahan diakibatkan adanya efisiensi pada anggaran belanja Obat, dikarenakan Ketersediaan obat di perusahaan penyedia obat tidak ada, obat yang dibutuhkan sudah tidak ada di pasaran, serta terdapat beberapa persyaratan untuk pengadaan obat belum terpenuhi;
10. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Pekerjaan Telah dilaksanakan 73,26%, hal ini dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan terkait rekomendasi inspektorat tentang metode pelaksanaannya yaitu pada anggaran perubahan sudah dianggarkan pada pengadaan langsung, akan tetapi sesuai dengan tidak ada anggaran untuk pengawasan, anggaran yang tidak terserap pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
11. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah penyerapan anggaran sebesar 62,85% dikarenakan anggaran digunakan pada perjalanan dinas luar daerah yang direncanakan lebih besar dibandingkan dengan undangan/perjalan dinas yang ada pada Tahun 2017;
12. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat realisasi fisik sebesar 76,11%, terdapat perbedaan harga “harga lebih rendah dibandingkan harga satuan pada DPA (Pagu) yaitu pada belanja mesin kasir, kursi kerja dan alat kedokteran umum, selain hal tersebut terdapat penolakan pada E-katalog yaitu Alat Kedokteran Umum Minor Surgery, Film Viewer, Circumsisi pada salah satu items dan item Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat Tidur Pasien, dan Partus Set;
13. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 90,58%, adapun penyerapan yang rendah disebabkan oleh efisiensi anggaran pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK);

14. Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada tolak ukur Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) sebesar 60,18%, Belum dilaksanakan penerimaan pegawai non PNS dikarenakan operasional BKKM belum dibuka 24 Jam sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pada Belanja Jasa Listrik Tagihan tidak sesuai dengan rencana penambahan daya;
15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 42,04% dan realisasi fisik mencapai 51,25%, adapun permasalahan yaitu tidak ada kesesuaian pada belanja Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa dilaksanakan oleh pegawai Non PNS sehingga penyerapan hanya pada pegawai PNS dengan Jumlah sebanyak 12 Orang pelaksana;
16. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Penyerapan anggaran sebesar 24,88%, rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas sehingga dana dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan, mempedomani DOMLAK bahwa Perjalanan Dinas maksimal dilaksanakan 2 orang sedangkan direncanakan sebanyak 3 orang sehingga terdapat rasionalisasi petugas yang melaksanakan perjalanan dinas;
17. Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan data pada Tahun 2017 terhadap Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdapat beberapa kasus yang selesai pengobatan namun tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB yang gagal pengobatan dikarenakan ketidak patuhan dalam minum obat, pindah dan meninggal;
18. Permasalahan dalam hal peningkatan kesehatan jiwa diantaranya adalah Kesehatan jiwa belum menjadi program prioritas, Kompetensi tenaga kesehatan yang masih minim baik pada tatanan

pelayanan primer maupun sekunder, Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa masih rendah;

19. Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang kesehatan kerja dan olahraga.

Solusi

1. Solusi pada Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat agar diberikan penghargaan untuk Kader agar Lebih semangat Melakukan Pendampingan Pada Ibu Balita untuk datang Ke Posyandu, dan dilakukannya Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Solusi pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Kegiatan Pelayanan kesehatan anak dilakukan dengan terbentuknya rumah tunggu kelahiran, Penempatan tenaga kesehatan yang merata, dan Fasilitas kesehatan yang memadai;
3. Solusi dari kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan, antara lain:
 - Dilakukan Pelatihan imunisasi bagi petugas yang belum terlatih;
 - Sosialisasi dan Advokasi bagi masyarakat yang masih ragu/takut untuk pemberian imunisasi bagi bayi. (melalui tokoh masyarakat, PKK, dll;
 - Revitalisasi dan peningkatan kapasitas Tim Gerak cepat dalam respon KLB;
 - Pengembangan sistem dan penguatan jejaring Surveilans di level komunitas/masyarakat;
 - Penguatan kapasitas petugas SKDR berbasis algoritma penyakit potensial KLB.

4. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan adalah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan) dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dan pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.
5. Sebagai masukan/usulan dalam peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.

b. Permasalahan dan Solusi RSUD Malingping

Permasalahan

1. Permasalahan Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyerapan anggaran sebesar 77,00% dikarenakan Tidak adanya dokter spesialis Residen pada kode rekening Non PNS yang bekerja di RSUD Malingping sehingga anggaran untuk pembayaran dokter tersebut tidak terserap. Selain hal tersebut Belanja yang tidak terserap yaitu: pemulasaran jenazah; sewa rumah/gedung/tempat kerja; sewa mobilitas; pemberian hadiah; dokumentasi/dekorasi/promosi publikasi;
2. Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin penyerapan Anggaran sebesar 50,68% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium narumber pengobatan gratis dan rapat siang kinik;
3. Pada Kegiatan Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan penyerapan Anggaran sebesar 69,75% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium narumber sebanyak 5 kegiatan rapat pertemuan.
4. Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD realisasi fisik 100% sesuai dengan target pendapatan BLUD. Pada belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatannya sebesar 79,74% hal ini disebabkan belanja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan RSUD Malingping.

Solusi

Solusi yang harus dilakukan kedepan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan.

c. Permasalahan dan Solusi RSUD Banten

Permasalahan

1. Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD realisasi fisik 100% sesuai dengan target pendapatan BLUD. Pada belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatannya sebesar 36,81% hal ini disebabkan Proses tahun pertama pola PPK BLUD terdapat beberapa aturan masih di susun, serta kehati-hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya;
2. Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor penyerapan Anggaran sebesar 57,31% dikarenakan pada belanja Suku cadang, alat dari vendor yang sesuai spesifikasi yang diinginkan terbatas (Pelayanan Mata dan Gigi) dan kebutuhan berbeda dengan pengajuan serta adanya sisa kontrak;
3. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah penyerapan Anggaran sebesar 79,32% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari yang direncanakan;
4. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) penyerapan Anggaran sebesar 66,2% dikarenakan terdapat dua pekerjaan Gagal lelang yaitu: Pengadaan IPAL dan Genset terkendala karena belum tersedianya rumah genset serta tidak cukup waktu pelaksanaanya;
5. Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (DPA Kewajiban TA.2016) penyerapan Anggaran sebesar 43,55% dengan pekerjaan pembangunan gedung 9 lantai, hal tersebut dikarenakan adanya rekomendasi BPK - RI dan dan sesuai surat Inspektorat No.700/783.1-Inspektorat/2017 tanggal 06 Oktober 2017 bahwa nilai pagu kewajiban dibayarkan (terrealisasi) bila pembangunan gedung selesai di bangun namun pembangunan gedung tidak jadi dilaksanakan;
6. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RS (DAK) DPA Kewajiban penyerapan Anggaran sebesar 47,63% dikarenakan adanya rekomendasi BPK - RI bahwa pembayaran

pembangunan gedung rawat inap dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;

7. Pada Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran penyerapan Anggaran sebesar 79,81% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih kecil dari rencana terutama di jasa Non PNS dan jasa kebersihan;
8. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, capaian 94,00% dikarenakan penyediaan peralatan jaringan SIM RS yang tidak cukup waktu untuk di lelang dan penyedia tidak bisa menyediakan alat sesuai dengan spesifikasi yang di pesan;
9. Pada Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, capaian 68,51% pada kegiatan pemeliharaan alat kesehatan suku cadang alat dari vendor yang sesuai spec terbatas dan kebutuhan berbeda dengan pengajuannya, dari sebelas (11) uraian kegiatan terlaksana 8 kegiatan, sedang 3 (tiga) uraian kegiatan terlaksana sesuai dengan kebutuhan;

Solusi

1. Dibutuhkan Evaluasi perencanaan RBA dan segera menyelesaikan aturan aturan administrasi pengelolaan BLUD nya;
2. Membuat perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan out put kegiatan yang diharapkan;
3. Membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan standar satuan harga yang sudah di tetapkan;
4. Untuk pengadaan IPAL dan Genset serta Rumah Genset pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) dianggarkan di DPA Tahun 2018;
5. Sinkronisasi yang baik dalam perencanaan kegiatan pada bidang dan bagian agar teranggarkan atau menghindari dobel pembiayaan;
6. Pelaksanaan lelang harus dipersiapkan matang dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal kegiatan dan target.

2.3.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak mencapai target disebabkan terdapat kendaraan yang rusak berat dan akan dihapuskan;

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan tuisi ke PU-an;
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang terdapat efisiensi sisa kontrak;
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang tidak tercapai disebabkan :
 - kelebihan anggaran dari premi asuransi barang milik daerah;
 - untuk jasa servis dan penggantian suku cadang sebagian kendaraan rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diserap;
 - Terdapat kelebihan anggaran untuk pajak kendaraan bermotor;
 - Terdapat efisiensi sisa kontrak dari pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja;
 - Terdapat Kendaraan roda tiga yang mengalami rusak berat.
5. Kegiatan Pembangunan Jembatan Terdapat perpanjangan waktu selama 50 hari untuk pekerjaan Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Saketi-Malingping (9 Jembatan);
6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan tidak Tidak cukup waktu dalam melaksanakan kegiatan karena adanya penambahan paket pekerjaan (52 paket terealisasi sebanyak 26 Paket);
7. Penetapan SOTK baru pada tahun 2017 dan pelantikan Kepala OPD baru dilaksanakan pada bulan Januari minggu ketiga dan pelantikan PPTK pada minggu keempat. Hal ini turut menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Lelang yang direncanakan mulai bulan Januari, baru dapat diusulkan ke ULP pada bulan April 2017. Pengajuan lelang ke ULP menunggu penetapan surat keputusan pejabat pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada struktur organisasi baru yang terbit pada bulan Maret.
9. Beberapa paket pekerjaan di anggaran murni memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 7 (tujuh) bulan, sehingga sisa waktu yang ada tidak cukup untuk melaksanakan lelang dan pekerjaan

kontruksi. Lelang yang direncanakan Januari agar terkontrak bulan Maret, lelang baru terlaksana bulan April.

10. Waktu pelaksanaan anggaran perubahan yang terbatas untuk melakukan lelang dan pelaksanaan konstruksi sehingga ada beberapa pekerjaan tidak terserap optimal dan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
11. Permasalahan non teknis dilapangan terkait dengan masyarakat dan instansi terkait. Dalam pengadaan lahan kebinamargaan, warga menolak harga ganti rugi yang ditetapkan Tim appraisal. Dalam kegiatan pengamanan pantai, pemilik lahan tidak mengijinkan lahan digunakan akses jalan kendaraan proyek. Hal ini menyebabkan pekerjaan kontruksi tidak dapat dilanjutkan.
12. Aturan baru tentang pencairan GU dan TU pada domlak APBD. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 2017 tentang UP dan TU yang mengharuskan revolving minimal 75,00% dari UP yang telah dipertanggungjawabkan.
13. Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air yang dianggarkan di APBD Murni Tahun Anggaran 2017 ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan berikut:
 - a. Pelaksanaan persiapan pengadaan lahan pad APBD-P 2017 tidak dapat dilaksanakan karena belum ada izin lingkungan dari Bupati Pandeglang sehingga menghambat proses penyusunan dokumen perencanaan (dalam dokumen UKL/UPL dari Kegiatan Dinas SDAP TA.2016 hanya dikeluarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang);
 - b. Pembebasan lahan di DI Cikadueun tidak dapat dilaksanakan karena dalam studi komprehensif/studi kelayakan, batasan lokasi yang akan dibebaskan hanya sampai pada saluran induk (primer) saja, dikhawatirkan pengelolaan kurang optimal. Pembebasan seharusnya sampai pada jaringan tersier sehingga penanganan DI menyeluruh sampai lahan petak pertanian (single managemen);
 - c. Bidang PJPA mulai tahun 2017 hingga tahun kedepan lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi eksisting hingga mencapai kondisi baik 100% dan

didukung oleh kegiatan pengendalian dan pemeliharaan pada setiap DI kewenangan Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Balai PSDA Provinsi Banten;

- d. Setelah tercapai kondisi DI baik 100% dan setiap DI terpelihara dan terkendalikan dengan baik maka akan dilakukan pengembangan DI baru (DI Cikadueun, DI Cihara, DI Cipatujah, DI Ciseukeut, DI Cibama, DI Cibareno dan DI Cimadur).

14. Kegiatan Perencanaan Teknis Bidang PJSA tahun anggaran 2017 mempunyai anggaran pengadaan lahan Sungai Cilimer. Pekerjaan ini tidak dilaksanakan dan anggaran tidak terserap dengan pertimbangan berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau disebutkan bahwa:

- Bab II pasal 6 huruf 3 Garis Sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
- BAB IV Ketentuan Peralihan Pasal 26 huruf c bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai dan sempadan danau yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai dan sempadan danau.

- b. Hasil koordinasi dengan Kepala Bagian Penyusunan Perundang-Undang II Biro Hukum Sekjen Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR 28/PRT/M/2015:

- Tanah sempadan yang diperoleh dengan benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan (yang sudah mempunyai sertifikat bisa diganti rugi)
- Tanah yang belum jelas kepemilikannya (Tidak mempunyai sertifikat atau girik) *tidak boleh ada ganti rugi tanah sempadan*, yang diperbolehkan *ganti rugi kerohiman* untuk tegakan maupun bangunan yang berada di atasnya.
- Perhitungan kerohiman harus melalui Penaksir Harga Apraisal

- Tanah sempadan sungai bisa disertifikasi atas nama Pemerintah.
 - c. Hasil koordinasi dengan Kasubag Evaluasi dan Pengawasan Produk HUKUM Kab/Kota Biro Hukum Provinsi Banten, sesuai dengan pasal 26 huruf c Permen PU 28/PRT/M/2015 yaitu untuk *sempadan sungai tidak perlu pembebasan lahan*.
15. Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air terdapat 3 paket pekerjaan konsultan pengawas tidak dilaksanakan karena pekerjaan fisik tidak dilaksanakan;
16. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) tidak dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan DI Cihara. Adapun terkendala pengadaan lahan, yaitu:
- a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendung dan Bangunan Pengambilan Intake Daerah Irigasi Cihara yang dilaksanakan pada TA.2016 belum sepenuhnya diselesaikan dan fungsional sehingga pekerjaan saluran induk yang sudah dianggarkan pada TA 2017 tidak dapat dikerjakan.
 - b. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan tertentu No 700/063-Inspektorat/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 disarankan:
 - Pekerjaan di Daerah Irigasi Cihara tidak dilanjutkan sementara karena dinilai Pekerjaan Pembangunan Bendung Daerah Irigasi Cihara tidak efektif dan efisien serta belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar;
 - Apabila pekerjaan dilanjutkan, pekerjaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan kontrak multiyear;
 - Perlu didesain ulang secara komprehensif dari aspek ketersediaan air, jaringan irigasi dan pemanfaatannya.
 - c. Hasil konsultasi dengan Puslitbang Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat direkomendasikan untuk dilakukan stock opname serta dilengkapi analisa hidrologi, hidrolika dan geoteknik yang lebih mendalam terkait kejadian rubuhnya retaining wall;
 - d. Keterbatasan waktu yang tersisa dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran, sehingga Pekerjaan Pembangunan Saluran Induk DI Cihara (DAK) tidak dapat

dilaksanakan dan tidak dapat disarap anggaran pada tahun 2017.

17. Kegiatan pengadaan lahan kebinamargaan di beberapa lokasi masih belum terserap/terrealisasi sesuai yang direncanakan. Adapun kendala dalam pengadaan lahan yaitu:
 - a. Pengadaan Ruas Jalan Siliwangi (Pamulang):
 - Terdapat tanah PLN dengan status Barang Milik Negara (BMN). Perlu surat dari Direksi PLN mengenai rekomendasi pembongkaran/hibah lahan.
 - Terdapat 2 (dua) persil lahan yang belum jelas kepemilikannya.
 - b. Pengadaan Tanah pengganti yang diusulkan Pengadilan Agama tidak jelas status kepemilikannya sehingga perlu dicari usulan tanah yang lain.
 - c. Warga menolak hasil penilaian Tim appraisal terhadap lahan yang diusulkan untuk pengganti Kecamatan Kopo dan Desa Nanggung. Akibat penolakan ini proses pengadaan tanah tidak dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
 - d. Pengadaan Tanah di ruas Sempu-Dukuh Kawung:
 - Terdapat 4 tanah wakaf yang harus ruislag sesuai dengan Undang-Undang Wakaf dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dan Kementerian Agama Pusat.
 - Ada tanah Aset Pemerintah yaitu Kepolisian
 - e. Pengadaan Tanah di Ruas Jalan Palima-Pakupatan
 - Terdapat tanah milik swasta Perumahan BMS yang belum jelas status lahan sebagai Fasum/Fasos atau bukan;
 - Ada tanah wakaf berupa masjid, dan terdapat salah satu tanah milik warga yang menolak hasil penilaian Tim Appraisal.
18. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Lebak terdapat Efisiensi dari sisa kontrak pengadaan *Excavator Long Arm, Wheel Excavator Mini, breaker*;
19. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang Terdapat Pembatalan Kontrak untuk pengadaan Compressor + Jack Hammer, karena barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;

20. Pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai progres fisik dan penyerapan anggaran kecil. Hal ini disebabkan karena tidak dapat diselesaikannya Pembangunan Pengaman Pantai Carita (Lanjutan). Dalam pelaksanaan pembangunan pengaman Pantai Carita (Lanjutan), pihak kontraktor tidak mendapatkan ijin dari pemilik tanah di Kawasan Lombok 2 Pantai Carita untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan/tanah sebagai akses jalan kegiatan proyek;
21. Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan (Review dan Harmonisasi Master Plan Kawasan Banten Lama), karena terkendala waktu.

b. Solusi

Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan tersebut, meliputi :

1. Pemanfaatan belanja aparatur hendaknya diarahkan agar lebih efisien, efektif, realistis, dan proporsional;
2. Proses perencanaan harus dibuat lebih matang dan lebih baik lagi serta lebih terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menimbulkan permasalahan;
3. Proses pembebasan lahan melibatkan banyak pihak (masyarakat pemilik lahan, BPN dan konsultan appraisal). Perlu peningkatan koordinasi antar pihak terkait sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat;
4. Penganggaran kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan jalan untuk lokasi yang sama tidak dianggarkan pada tahun anggaran yang sama. Ketika ada kendala dalam pengadaan lahan tidak akan menghambat kegiatan pembangunan jalan;
5. Sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada PPTK dan staf administrasi yang menangani SPJ tentang perubahan aturan GU dan TU sehingga proses SPJ dapat berjalan lancar dan sesuai terget;
6. Berkaitan dengan pengadaan lahan PJSA, pada tahun anggaran 2018 Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air DPUPR Provinsi Banten akan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau kepada Dinas terkait dan warga sekitar Sungai Cilemer. Selain perlu dibuatkan

Peraturan Daerah tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dengan Kajian Akademis oleh instansi yang berwenang.

7. Berkaitan dengan permasalahan pengadaan Lahan kebinamargaan solusi yang akan dilakukan yaitu:
 - a. Sosialisasi intensif kepada Pemilik Lahan. Dalam menyampaikan hasil taksiran harga, Tim Appraisal perlu menjelaskan lebih detail mengenai data dan Peraturan yang mendasarinya;
 - b. Mencari alternatif tanah pengganti dari usulan Pengadilan Agama dan tanah pengganti untuk tukar guling dengan tanah wakaf dan Kantor Kecamatan Kopo serta Desa Nanggung;
 - c. Membuat surat konsinyasi yaitu surat penitipan uang di pengadilan untuk ganti rugi tanah di Jl.Siliwangi (Pamulang) dan Jalan Palima-Pakupatan (Jembatan Bogeg);
 - d. Meminta surat rekomendasi/keterangan dari Pemerintah Kota Serang mengenai peruntukan lahan di Perumahan BMS. Jika peruntukan lahan untuk fasilitas umum/fasilitas social maka tidak perlu diberikan ganti rugi. Namun jika peruntukan lahan bukan untuk fasum/fasos, maka DPUPR Provinsi Banten akan memberikan ganti rugi.
8. Untuk mengurangi kendala non teknis dilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus melibatkan semua stakeholder yang terkait sejak dalam proses perencanaan. (warga sekitar, pemilik tanah, pihak kelurahan, pihak kecamatan dll). Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi mengenai maksud, tujuan, manfaat dari suatu pekerjaan sehingga semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama.
9. Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang melibatkan stakeholders yang membahas perlu tidaknya dilakukan perubahan anggaran dengan mempertimbangkan constrain waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama kepada para

pengelola kegiatan untuk memudahkan dalam operasional kegiatan yang akan berjalan.

2.3.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, adalah:

a. Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan dengan penyerapan dibawah 85,00% dikarenakan pada saat perencanaan menggunakan asumsi harga satuan tertinggi pada SSH sehingga terdapat efisiensi karena realisasi belanja menyesuaikan harga pasaran (belanja jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas, pajak kendaraan, penggandaan, ATK dll), belanja sewa ruang rapat/ tempat penginapan yang tidak diserap sesuai arahan/ kebijakan Gubernur untuk menyelenggarakan rapat di ruang kantor;
2. Terdapat beberapa kegiatan Konsultansi dengan penyerapan dibawah 85,00% karena efisiensi harga satuan tenaga ahli menyesuaikan pengalaman pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B terdapat beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu:
 - Pengadaan lahan KP3B untuk pembebasan lahan seluas 14.390 m2 dan konsultan apraisal lahan yang dianggarkan pada APBD-P TA. 2017 tidak terlaksana dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
 - Pekerjaan pemagaran masjid kecil (Masjid Gowok) dikawasan KP3B dan Konsultan Pengawasan tidak dilaksanakan karena pembelian tanah untuk masjid baru selesai dibayarkan/dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017 sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi.
4. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dengan tolok ukur Penyediaan Air Bersih pada Kawasan strategis sebanyak 47 paket, diantaranya 6 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, karena mobilisasi material terkendala lokasi/akses jalan yang tidak bisa

dilalui kendaraan (musim hujan) dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Selain itu terdapat efisiensi dari beberapa paket yang sudah dilaksanakan.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan terdapat item pekerjaan pengadaan lahan seluas 4,6 Ha di Banten Lama yang dianggarkan pada APBD-P TA.2017 karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

b. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut untuk periode ke depan antara lain, sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam menganggarkan suatu item pekerjaan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Lebih cermat dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kondisi yang ada;
3. Persiapan pengadaan lahan lebih matang/intensif;
4. Perlunya perencanaan yang lebih akurat dalam menentukan harga satuan dengan melakukan survey harga pasaran setempat;
5. Agar lebih teliti mencermati hasil lelang pekerjaan dari ULP terutama berkaitan dengan tenaga ahli;

2.3.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, adalah:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta tidak mengalami hambatan. Namun demikian khusus bagi kegiatan yang pelaksanaannya berlokasi di kabupaten/kota agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan bangsa dan politik.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
- 2) Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis;
- 3) Belum optimalnya kerjasama dalam pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat.

b. Solusi

- 1) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 4) Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS, Instansi terkait dan masyarakat.
- 6) Untuk tahun depan Anggaran untuk pemeliharaan gedung tidak dianggarkan lagi.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Permasalahan

- 1) Terkendala aturan yang berbeda itulah Anggaran Monev dalam Perencanaan mengikuti Juknis APBN BNPB yang memperbolehkan mengalokasikan untuk Honor Pengelola, sementara Anggaran Hibah dimaksud masuk di Anggaran APBD Provinsi Banten harus mengikuti Aturan APBD Provinsi Banten yang tidak memperbolehkan adanya alokasi untuk

Honor Pengelola, sehingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tidak terlaksana dengan optimal;

- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Provinsi Banten yang berkualitas dan berintegritas sehingga berdampak lambatnya penyelesaian Administrasi terutama SPJ;
- 3) Adanya ketidak sinkronan pada Rencana Operasional Kerja (ROK) yang telah di susun dengan pelaksanaan dilapangan.

b. Solusi

- 1) Pada penyerapan Triwulan IV direncanakan diadakan perubahan mengikuti aturan APBD Provinsi Banten Khususnya anggaran Honor Pengelola kegiatan diubah ke alokasi Perjalanan Dinas, Namun Perubahan Anggaran Tidak dapat direalisasi karena Tim Anggaran Daerah dari BAPPEDA mensyaratkan harus ada JUKNIS APBN dan JUKNIB BPBD Prov. Banten;
- 2) Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan Profesional serta berintegritas melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD dan perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan;
- 3) Dilakukan Perbaikan dan Penjadwalan ulang untuk triwulan berikutnya pada anggaran Perubahan.

2.3.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada Belanja Tidak Langsung capaian realisasi keuangan sebesar Rp15.297.194.166,00 (87,91%) dengan sisa anggaran Rp2.102.805.834,00 (12,09%), hal tersebut dikarenakan adanya pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten yang pensiun sebanyak 4 orang, meninggal sebanyak 2 orang, pindah ke SKPD lain sebanyak 2 orang sehingga Gaji dan Tunjangan Kinerja tidak dapat diserap.

2. Pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana terdapat tolok ukur Asuransi Jiwa TAGANA sebesar Rp145.200.000,00 tidak dapat dicairkan karena sebagian besar peserta TAGANA tidak dapat melampirkan KTP dan KK.
 3. Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berdasarkan *by name byadress*, sedangkan untuk pelaksanaan pendataan menjadi kewenangan kabupaten/kota.
 4. Pada beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi anggaran.
- b. Solusi
1. Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2017 lebih di pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan anggaran.
 2. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yang valid dan terukur.
 3. Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan *by name by adress* di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota, baik melalui dana APBD Provinsi maupun Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.

2.3.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:

- a. Permasalahan
1. Permasalahan utama dalam penyerapan adalah Terlambatnya pengesahan APBD perubahan sedangkan banyaknya kegiatan yang berada pada anggaran perubahan, sehingga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatannya;
 2. Ada keterlambatan pengajuan pencairan kontrak pengadaan barang jasa, sehingga berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Adanya pengurangan anggaran (efisiensi) untuk belanja makan dan minum kegiatan;

4. Kurang matangnya dalam menyusun perencanaan Program Kegiatan yang berakibat adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan;
 5. Adanya pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang yang berakibat kepada besarnya nilai SilPa.
- b. Solusi
1. Perlu adanya perencanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga di tahun selanjutnya pelaksanaan kegiatan bisa sesuai dalam hal penjadwalan waktu penyusunan, penginputan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);
 2. Agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah dibuat;
 3. Setiap penganggaran belanja barang dan jasa yang dilaksanakan agar berpatokan kepada Standar Satuan Harga yang berlaku, sehingga adanya selisih perbedaan harga dapat diminimalisir;

Pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) setiap bidang agar berpatokan kepada dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan target yang telah ditentukan, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi kegiatan yang tidak dilaksanakan.

2.3.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran tidak digunakan terkait Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat mengingat kewenangan Pengadaan Sarana Kantor berupa Meja dan Kursi menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten selaku pengelola Gedung Kantor Bersama SKPD Provinsi Banten;

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran tidak digunakan pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas serta Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang disesuaikan dengan jumlah aset kendaraan bermotor Roda 4 dan 2 yang dioperasikan oleh Dinas P3AKKB Provinsi Banten;
3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran anggaran tidak digunakan pada Belanja Promosi dan Publikasi sebesar Rp10.000.000,- berupa Dekorasi Kendaraan Hias HUT Banten yang diikuti oleh Dinas P3AKKB Provinsi Banten Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas disesuaikan dengan jumlah aset kendaraan bermotor Roda 4 dan 2 yang dioperasikan;
4. Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender anggaran tidak digunakan pada Belanja Promosi dan Publikasi Penyusunan Anggaran esponsif Gender (ARG) bag SKPD Provinsi, Kab/Kota dan PSW sebesar Rp12.000.000,00 yang disesuaikan dengan metoda kegiatan yang dilaksanakan berupa Rapat Koordinasi;
5. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan agar tidak digunakan terutama pada Belanja Narasumber Penguatan Pengembangan Industri Rumahan Lintas Sektoral dan Lintas Program Bagi Pelaku IR di Wilayah Lebak dan Pandeglang sebesar Rp10.000.000,00 yang disesuaikan dengan jumlah narasumber yang hadir;
6. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga anggaran tidak digunakan antara lain:
 - Uang Saku Peserta Integrasi Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) Dengan P4K sebesar Rp11.250.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran peserta;
 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi Program PKK yang merupakan Paket Fullday sebesar Rp15.820.000,00 dan Kegiatan Bintek Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bekerja yang merupakan Paket Fullboard sebesar Rp123.504.000,00 yang disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang pembatasan

pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Fullboard, Fullday dan Halfday;

- Belanja Narasumber Bintek Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bekerja sebesar Rp15.000.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran narasumber;
 - Belanja Cetak dan Penggandaan Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp11.300.000,00 yang disesuaikan dengan materi kegiatan yang disampaikan;
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp163.247.300,00 yang disesuaikan dengan banyaknya undangan yang diterima untuk ditindaklanjuti;
 - Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp11.900.000,00 yang disesuaikan dengan kehadiran narasumber dan moderator;
7. Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak terdapat beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain :
- Percepatan Pembentukan Kota Layak Anak sebesar Rp40.490.000,00 melalui sosialisasi Permen PPPA tentang Pembentukan Kota Layak Anak tidak dilaksanakan, mengingat Permen PPPA dimaksud telah beberapa kali dilakukan sosialisasi pada periode pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya;
 - Uang Saku Peserta dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembinaan dan Peningkatan Anak yang disesuaikan dengan kehadiran.
8. Permasalahan Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan yang dilakukan oleh PPTK;
9. PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada saat dilakukannya perubahan anggaran;
10. Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak tergambarkan secara mendetail dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
11. Target Sasaran tidak tidak tergambarkan secara mendetail dalam Term of Reference (TOR);

12. Penetapan target kinerja tolok ukur belum mencerminkan target sasaran jangka menengah perangkat daerah (Renstra).

b. Solusi

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan *Cash Budgetting* yang telah ditetapkan.

2.3.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Terdapat beberapa tolok ukur yang tidak dilaksanakan, disebabkan diluar kewenangannya sebagaimana arahan Inspektorat, yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN 2017 dan tolok ukur Kegiatan APIP.

2.3.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data, Informasi Kependudukan Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan terdapat tolok ukur kegiatan Penyusunan dan Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tidak dilaksanakan disebabkan telah terdapat target output sejenis melalui Dana Alokasi Khusus;
2. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kependudukan (DAK) anggaran yang tidak diserap antara lain :
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebesar Rp13.846.326,00 yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan

- penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebesar Rp96.272.310,00 yang disesuaikan dengan Permendagri No. 102 Tahun 2016 tentang Juklak DAK Adminduk hanya 25,00% dikarenakan pelaksanaan Rakornas Kependudukan yang semula diagendakan oleh Ditjen Adminduk Kemendagri dilaksanakan diluar pulau jawa namun dialihkan di Jakarta.
3. Pada Kegiatan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil (DAK) terkendala pada beberapa Tolok Ukur Kegiatan, antara lain : Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Promosi dan Publikasi sebesar Rp55.034.500,00 yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Adminsitasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK), anggaran yang tidak digunakan antara lain : Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Rapat Pemanfaatan Data dan PIAK Kependudukan Tingkat Provinsi sebesar Rp12.500.000,00 yang disesuaikan dengan materi pada saat pelaksanaan kegiatan, Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Cetak Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester Tingkat Provinsi sebesar Rp20.300.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk Terkait PIAK dan Pemanfaatan Data yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
 5. Secara umum, permasalahan dalam penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang

bersumber dari PAD Provinsi Banten maupun DAK dan DAU meliputi :

- Review atas Pelaksanaan Anggaran terhadap Standar Satuan Harga Tahun 2017;
- Penjadwalan dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tidak diikuti dengan proses persiapan yang cukup sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Penetapan target sasaran, baik peserta, narasumber maupun moderator tidak cukup tergambarkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan;
- keterbatasan waktu pelaksanaan DAK sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
- Review atas anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan mempedomani Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Juklak DAK Adminduk hanya untuk menghadiri Rakornas Kependudukan.

b. Solusi

1. Menetapkan target sasaran yang jelas dan tergambar secara utuh dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
2. Menyusun ROK yang menggambarkan secara detail kebutuhan anggaran serta tahapan proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
3. Mempedomani Standar Satuan Harga serta peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi rujukan dalam proses penyusunan anggaran.

2.3.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Adanya efisiensi dari belanja barang/jasa;
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan, oleh karena penetapan APBD Perubahan TA.2017 tidak sesuai dengan perencanaan;
3. Adanya tolok ukur yang tidak dilaksanakan;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkecakupan Khusus (kompeten);

5. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;
6. Keterlambatan dalam proses pencairan keuangan.

b. Solusi

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, dimasa mendatang diperlukan perencanaan yang matang, terukur, terjadwal. Sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir, antara lain:

1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait dari mulai perencanaan anggaran hingga pelaporan;
2. Menyusun program, kegiatan dan penganggaran secara tepat, akurat dan skala prioritas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

2.3.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat efisiensi Belanja Listrik, belanja makan minum rapat, dan belanja makan minum kegiatan;
2. Kegiatan Pendayagunaan Telematika, dikarenakan Bintek system informasi perencanaan penganggaran dan laporan tidak dapat dilaksanakan;
3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan, dikarenakan Penerbitan Tabloid Menara Banten;
4. Kegiatan Penyelenggaraan KIP dengan tolok ukur Kegiatan event Hari Hak Untuk Tahun sedunia tidak dapat dilaksanakan dan Penyusunan Naskah Akademik UPT sekretariat KI tidak disetujui oleh Tim Penataan UPT.

b. Solusi

1. Harus dilakukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan;
2. Akan lebih selektif dalam menentukan penjadwalan yang melibatkan unsur narasumber luar pada Kegiatan Pendayagunaan Telematika dengan tolok ukur Bintek system informasi perencanaan penganggaran;

3. Harus dilakukan penyesuaian pada pola penganggaran terhadap Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan;
4. Kedepan untuk kegiatan Penyelenggaraan KIP dengan tolok ukur Kegiatan event Hari Hak untuk Tahun sedunia realisasi keuangan agar dapat disesuaikan dengan kesesuaian waktu pelaksanaan dan Tolok Ukur kegiatan Penyusunan Naskah Akademik UPT sekretariat KI Tidak dianggarkan lagi karena usulan pendirian UPT tidak disetujui oleh tim penataan UPT.

2.3.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Permasalahan

1. Pembangunan gedung PLUT tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang oleh LPSE;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi pada tolok ukur Pemeringkatan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persiapan dan terkendala dengan aturan yang mengharuskan dilaksanakan oleh lembaga survey yang berakreditasi;
3. Terdapat efisiensi pada tolok ukur kegiatan bimbingan koperasi pada jumlah koperasi dari 138 koperasi ternyata dalam kondisi terahir berjumlah 125 koperasi, hal ini dikarenakan koperasi tidak aktif.

b. Solusi

1. Agar proses lelang diajukan di awal tahun, karena pengajuan pembangunan gedung PLUT diajukan pada bulan agustus sehingga tidak cukup waktunya;
2. Agar PPTK lebih teliti dalam penyusunan anggaran kegiatan.

2.3.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pelaksanaan progam Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi adalah jadwal kegiatan yang masih belum pasti terutama

kegiatan promosi yang dilaksanakan BKPM RI sehingga menyulitkan dalam pengalokasian anggaran;

2. Belum optimalnya penerapan dari standar operasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan;
3. Adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik;
4. Permasalahan Keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017;
5. Lemahnya perencanaan awal penganggaran dan pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
6. Pelarangan melaksanakan kegiatan/rapat di luar kantor, sehingga Perjalanan Dinas, sewa ruang rapat, penginapan, dan makan minum yang telah dianggarkan tidak terserap secara optimal;
7. Dampak meletusnya Gunung Agung di Bali yang menyebabkan batalnya penyelenggaraan pameran penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang menyatakan bahwa honorarium tim terkoordinasi tidak lagi diperkenankan dibayarkan;
9. Terlambatnya proses lelang.

b. Solusi

1. Melakukan koordinasi dengan BKPM RI mengenai perubahan jadwal promosi;
2. Penerapan kedisiplinan bagi tiap-tiap pelaksana penyelenggaraan perizinan dalam melaksanakan proses perizinan agar sesuai dengan standar yang diterapkan;
3. Komunikasi yang intensif dan optimal dengan OPD teknis dan penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten/Kota demi tercapainya sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Mengikutsertakan pegawai BPPT dalam kegiatan-kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/kursus yang dapat meningkatkan kompetensi dalam mendukung peningkatan pencapaian kinerja organisasi;

5. Secara terus menerus berupa memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja, termasuk didalamnya penyempurnaan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang sudah dimiliki.
6. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
7. Memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan;
8. Mempersiapkan dokumen pendukung lelang lebih awal.

2.3.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor efisiensi Pada Belanja Kendaraan;
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat efisiensi Pada Belanja Pemeliharaan Kendaraan;
3. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dikarenakan Banyak Kegiatan luar daerah yang sudah difasilitasi oleh penyelenggara, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

b. Solusi

Diharapkan kedepan akan dilakukan lebih selektif dalam penganggaran.

2.3.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik, adalah:

a. Permasalahan

1. Masih belum maksimalnya pengumpulan data yang dilakukan baik dari internal SKPD, Stakeholder, Kab/Kota yang berakibat kompilasi data masih belum lengkap;
2. Tenaga ahli IT dalam pengelolaan website masih belum mencukupi, menyebabkan informasi yang disampaikan belum maksimal dan updating data masih tersendat;

3. Pengaduan Masyarakat/Lembaga Masyarakat terkait kebutuhan informasi publik masih belum maksimal.

b. Solusi

1. Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menyiapkan tenaga IT yang handal dan profesional;
3. Mengembangkan jaringan dalam pengelolaan website melalui updating dan upgrade website.

2.3.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya terdapat 2 (dua) kegiatan yang serapan rendah, meliputi :

- Kegiatan Pemanfaatan Taman Budaya terdapat efisiensi dari SPPD, belanja Modal barang meubelair dan pendataan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu;
- Kegiatan Pemanfaatan Museum terdapat Belanja jasa konsultasi disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan.

b. Solusi

Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Belum meratanya minat baca antara daerah perkotaan dan pedesaan;
2. Belum meratanya akses layanan perpustakaan bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan;
3. Belum maksimalnya difersifikasi layanan perpustakaan digital;

4. Kurangnya promosi perpustakaan;
5. Belum maksimalnya capaian perpustakaan standar nasional dikarenakan wewenang akreditasi perpustakaan ada pada Perpustakaan Nasional RI;
6. Perlunya dukungan/tambahan sumber daya manusia yang memadai dalam bidangnya (IT, Akuntansi, Pelaporan) dalam rangka memaksimalkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
7. Pengadaan koleksi E-Book ada yang tidak dilaksanakan karena kendala kelengkapan administrasi yang tidak dipenuhi pihak penyedia.
8. Masih terdapatnya kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja kegiatan yang belum tepat, sehingga membutuhkan perubahan anggaran.
9. Kesalahan perencanaan Tolok Ukur pengadaan DED Diorama arsip sehingga anggaran tidak bisa diserap karena harus membuat Elementary Design dan Story Line terlebih dahulu.
10. Kurang cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Tidak Langsung sehingga mengakibatkan silpa yang cukup besar.
11. Permasalahan Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan informasi kearsipan.
12. Sarana teknologi informasi yang belum memadai dalam mendukung pemanfaatan IT dalam kearsipan.
13. Belum maksimalnya konektifitas jaringan informasi kearsipan pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.

b. Solusi

1. Memperluas kegiatan pengembangan minat baca melalui berbagai seminar, lomba, gebyar ke pelosok kab/kota se Provinsi Banten.
2. Memperbanyak jumlah titik layanan kunjungan mobil unit perpustakaan keliling di 8 kab/kota se Provinsi Banten sehingga dapat menjembatani masyarakat yang jauh aksesnya dari layanan perpustakaan tetap dapat memanfaatkan perpustakaan.
3. Pengembangan perpustakaan digital melalui e-Banten, yang merupakan layanan perpustakaan digital berbasis e-Book.

4. Meningkatkan promosi perpustakaan melalui berbagai cara baik media cetak, media elektronik dan media sosial.
5. Meningkatkan pembinaan perpustakaan mengacu pada standar nasional perpustakaan guna menyiapkan sebanyak mungkin perpustakaan yang siap dilakukan akreditasi oleh Perpustakaan Nasional.
6. kualitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan serta koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memenuhi kualifikasi SDM yang di butuhkan.
7. PPTK dan PEP lebih cermat dalam menyusun perencanaan dengan berdasarkan Regulasi yang ada dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan dan Kearsipan.
8. Koordinasi yang lebih intensif baik dengan leading sektor Pemerintahan maupun mitra kerja.
9. Sisa Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam teknologi informasi melalui berbagai pelatihan dan magang.
10. Peningkatan sarana teknologi informasi dalam menunjang digitalisasi Arsip.
11. Melakukan langkah koordinasi yang intensif dengan berbagai leading sektor yang terkait dengan konektifitas jaringan kearsipan seperti ANRI, Dinas Kominfo dan Bappeda Provinsi Banten.

2.3.19 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Permasalahan Kegiatan pengadaan sarana prasarana lampu suar (BBAT) realisasi anggaran kegiatan tidak terlaksana dikarenakan dalam suatu akan merencanakan dan sampai pelaksananya pembangunan harus ada beberapa tahapan, seperti dalam kegiatan ini bahwa untuk kegiatan ini bahwa belum adanya dari pada bangunan *breakwater*.

b. Solusi

Perlu adanya perencanaan, yang lebih maksimal lagi, sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik;

2.3.20 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada tolok ukur Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang hanya terserap sekitar 56,26% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp354.590.000,00. Hal ini disebabkan minimnya aktifitas kendaraan operasional kantor (non operasional jabatan) dalam penggunaannya sehingga kendaraan – kendaraan tersebut belum memerlukan service berkala serta pergantian suku cadang.
2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada tolok ukur Peremajaan kendaraan bermotor roda 4 yang tidak terserap sejumlah pagu tolok ukur sebesar Rp195.300.000,00. Hal ini disebabkan minimnya persiapan dalam menyusun spesifikasi kendaraan yang diajukan sehingga penjadwalan pelaksanaan *e-purchasing* terhambat selain itu terdapat nilai belanja karoseri/peremajaan lebih besar daripada perolehan aset sehingga disarankan oleh Inspektorat Provinsi Banten untuk tidak dilaksanakan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pada tolok ukur Fasilitasi bimbingan teknis yang hanya terserap sekitar 2,90% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp30.000.000,00, Hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk yang meminta aparatur PNS dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis, adapun undangan bimtek yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi yang diperlukan.

b. Solusi

1. Memahami analisa perencanaan berbasis SMART (spesific, measurement, realiable dan time bond);
2. Melaksanakan pengawasan atas penguasaan barang milik daerah yang dikuasai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pemahaman tentang "program follow function" dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai landasan

dalam menyusun anggaran agar terciptanya anggaran profesional, yang responsif terhadap efektifitas dan efisiensi sehingga tepat guna dan tepat sasaran dalam pengelolaannya.

2.3.21 Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian, adalah:

a. Permasalahan

1. Pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pada kantor Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner realisasi keuangan terserap 84,35%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada pembayaran listrik, telpon serta makan minum rapat;
2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) hanya terserap 88,27%. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi dari belanja pupuk dan efisiensi belanja sewa ruang;
3. Realisasi keuangan kegiatan Pengembangan Pakan Ternak sebesar 84,54%. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi pada belanja makan minum kegiatan dan sewa ruang rapat;
4. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian tahun 2017 berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan realisasi fisik mencapai 100%. Adapun sisa anggaran yang ada dikarenakan terdapat efisiensi pada rekening belanja makan minum kegiatan, sewa ruang kegiatan, maupun honorarium internal. Salah satu factor adanya efisiensi ini adalah belum jelasnya peraturan yang mengatur pengeluaran biaya pada honorarium internal, serta kebijakan penggunaan ruang rapat pada hotel.

b. Solusi

1. Sisa Diperlukannya petunjuk pelaksanaan APBD yang lebih jelas dan sosialisasi yang baik terhadap SKPD;
2. Diperlukannya pemahaman yang sama antara instansi pemerintah terhadap pelaksanaan APBD.

2.3.22 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Terdapat target kinerja di 4 (empat) kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan yang tidak seluruhnya terealisasi, yaitu hanya terelaborasi 6.903 RTS dari target 7.045 RTS, karena adanya kendala teknis lapangan sehingga terdapat 142 RTS tidak terealisasi. Sehingga mengakibatkan timbulnya deviasi fisik (capaian kinerja *output*) sebesar 0,39% dan berimbas pada capaian kinerja *output* pelaksanaan APBD;
2. Permasalahan realisasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial (BANSOS) pada pelaksanaan 2 kegiatan yaitu BANSOS Listrik Pedesaan dan hibah Sumur Bor Produksi Air Tanah dikarenakan realisasi anggaran untuk kedua kegiatan tersebut baru selesai di akhir bulan Nopember 2017, sedangkan dalam dokumen Rencana Operasional Kegiatan (ROK) diplot selesai pada bulan Juni-Juli 2017. Sehingga ada keterlambatan selama 5 bulan (Agustus-Nopember). Selama kurun waktu 5 bulan tersebut, deviasi negatif penyerapan anggaran Dinas ESDM Provinsi Banten cukup besar (30-40%), dimana 60-75% adalah kontribusi dari permasalahan hibah dan BANSOS ini.

Kendala dan hambatan yang dihadapi pelaksanaan kegiatan hibah dan bansos adalah diantaranya sebagai berikut, yaitu :

- Kendala penyiapan dokumen pelelangan (adanya proses verifikasi ulang calon penerima bansos dan proses pergeseran anggaran);
 - Proses pelelangan dilakukan sampai 3 kali (2 kali gagal lelang);
 - Terlambatnya penetapan calon penerima hibah dan BANSOS oleh Gubernur.
3. Permasalahan realisasi belanja perjalanan dinas dan makan minum kantor;
 4. Alokasi berlebih perencanaan anggaran untuk pembayaran rekening PJU (perbatasan dan kawasan pariwisata);
 5. Sisa anggaran di DPA yang berasal dari sisa kontrak.

b. Solusi

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi internal setiap bulannya di SKPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus penyiapan bahan rapat pimpinan dengan Gubernur;
2. Koordinasi terpadu dengan PT. PLN terkait penyiapan dokumen verifikasi calon penerima BANSOS Listrik Perdesaan;
3. Koordinasi terpadu dengan POKJA ULP Provinsi Banten terkait percepatan dan penyelesaian proses pelelangan untuk paket-paket pembangunan Listrik Perdesaan;
4. Menetapkan calon penerima hibah dan bantuan sosial melalui Surat Keputusan Kepala OPD setelah diterbitkannya SK Pelimpahan wewenang penetapan penerima hibah dan BANSOS dari Gubernur ke kepala OPD;
5. Optimalisasi anggaran yang tidak digunakan di DPA dengan mengubahnya di APBD Perubahan TA.2017.

2.3.23 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya, belum dapat diintervensi Pemerintah;
2. Masih ditemui barang kadaluwarsa yang beredar;
3. Meluasnya aktivitas MEA pada tahun 2017, secara otomatis membuka peluang bagi kegiatan investasi di Provinsi Banten yang secara langsung akan berdampak pada perekonomian di Banten.

b. Solusi

1. Penyelesaian masalah terhadap dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya ini tidak bisa dilakukan secara parsial, namun perlu kebijakan nasional;
2. Dilakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha tentang pemahaman bahaya mengkonsumsi barang kadaluwarsa;

3. Strategi yang dilakukan terhadap meluasnya aktivitas MEA pada tahun 2017 harus berorientasi pada bagaimana IKM di Banten tetap terpancang kuat dan berdaya saing.

2.3.24 Urusan Pilihan Bidang Industri

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Bagi beberapa pelaku industri, permasalahan yang umum dihadapi adalah berkaitan dengan pemasaran produk. Para pelaku IKM di beberapa wilayah Kabupaten/Kota biasanya masih bertransaksi dengan cara konvensional sedangkan saat ini konsumen sedang gemar bertransaksi *online*. Idealnya, para pelaku industri sudah dapat menguasai teknologi informasi sederhana khususnya berbasis android;
2. Keterbatasan personil untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian sampai saat ini juga masih menjadi salah satu kendala;
3. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku IKM dengan perusahaan besar terutama dibidang penyediaan bahan mentah maupun pemasaran.

b. Solusi

1. Langkah yang ditempuh berkaitan dengan pemasaran produk diantaranya dengan melibatkan praktisi marketing yang berkolaborasi dengan praktisi IT (*information technology*) untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku IKM;
2. Untuk mengatasi keterbatasan personil untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian harus melibatkan praktisi, akademisi dan asosiasi;
3. Perlu ditingkatkan kerjasama antara IKM dengan perusahaan besar terutama adanya kemitraan baik dalam hal ketersediaan bahan mentah maupun dalam pemasaran.

2.3.25 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah:

- Sekretariat DPRD
 - a. Permasalahan

Pada Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, penyerapan belanja masih rendah realisasinya diantaranya adalah pembahasan Raperda.
 - b. Solusi

Dilakukan dengan upaya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani produk hukum pemerintah daerah selaku leading sector penyusunan dan pembahasan hasil legislasi daerah dengan mempertimbangkan jadwal dan agenda kegiatan DPRD sehingga Raperda dapat dibahas sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Biro Hukum
 - a. Permasalahan
 1. Pada beberapa kegiatan yang serapan kurang dari 80,00% disebabkan adanya efisiensi anggaran;
 2. Belanja Promosi dan Publikasi kegiatan Penyusunan Raperda (1 Raperda x 1 kali tayang x 1 keg) tidak terlaksana, disebabkan Raperda yang diterima Biro Hukum, tidak ada yang layak untuk dipublikasikan karena masih dikembalikan ke pengusul serta jumlah halaman Raperda yang diusulkan tidak terjangkau oleh anggaran penayangan sebesar Rp30.000.000,00 untuk Raperda RPJMD;
 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Biro Hukum, realisasi keuangan hanya terserap 37,54%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi Keuangan pada belanja cetak dan belanja penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan;
 4. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah terdapat beberapa perjalanan dinas yang semula direncanakan, tidak bisa dilaksanakan karena belum ada undangan masuk ke

Biro Hukum, sehingga adanya efisiensi pengeluaran anggaran belanja perjalanan dinas;

5. Pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di beberapa tolok ukur, meliputi :

- Terdapat efisiensi pembiayaan, dan terdapat prestasi terhadap Jumlah Perda yang dilakukan Pengkajian dianggarkan 3 Kajian namun dihasilkan 5 Kajian Perda, serta terdapat prestasi dalam Asistensi, dimana raperda yang dibahas bersama dengan DPRD dianggarkan 6 Asistensi terlaksana 8 Asistensi;
- Kegiatan yang tidak dilaksanakan hanya 2 kegiatan yaitu 1 Harmonisasi dan Sinkronisasi, dan 1 Pemantapan Konsepsi. Hal ini karena Raperda yang dibahas belum diterima oleh Biro Hukum.

6. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum hanya terlaksana 2 kegiatan Forum Diskusi dan 1 kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu tidak mencukupi, selebihnya karena efisiensi pada belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja jasa tenaga ahli.

b. Solusi

Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk tahun yang akan datang program dan kegiatan pada Biro Hukum perencanaanya akan disusun dengan lebih cermat dan teliti sehingga dapat dihasilkan suatu perencanaan yang lebih optimal untuk mencapai target yang telah direncanakan.

- Biro Organisasi

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah terdapat kendala pada 2 tolok ukur kegiatan, yaitu:

- Tolok ukur Kegiatan penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari ren aksi KPK mengalami hambatan pada saat penyusunan/proses input data pada aplikasi Sinjab (www.sinjab.bantenprov.info) ini disebabkan kurang pemahaman dalam mengidentifikasi analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagian OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan adanya regulasi

- baru terkait nomenkatur JFU (Jabatan Fungsional Umum) Permendagri Nomor 25 Tahun 2016;
- Tolok ukur Penyusunan Standar kompetensi teknis dan manajerial Jabatan tidak bisa dilaksanakan karena penyusunan Anjab dan ABK belum tuntas.
2. Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda Perangkat Daerah Kab/Kota, pada tolok ukur kajian penataan lembaga tertentu sebagai bagian perangkat daerah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehubungan dengan perubahan perundang-undangan tersebut maka Peraturan Pemerintah yang mengatur Perangkat Daerah turut mengalami perubahan yaitu dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, klausul tentang lembaga tertentu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut;
 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten, pada tolok ukur Penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten, tidak dapat dilaksanakan karena sampai masa ahir periode anggaran tahun 2017 Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan keputusan terkait evaluasi Lakip Provinsi Banten;
 4. Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur pada tolok ukur Penyusunan Rapergub *Reward* dan *Panishment* Aparatur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Banten yang diinisiasi BKD telah menerbitkan Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana telah diubah oleh Pergub Nomor 31 Tahun 2017

tentang perubahan Pedoman pengukuran kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

b. Solusi

1. Melakukan Koordinasi lebih lanjut dengan seluruh Perangkat Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara mengenai Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Manajerial, dan Standar Kompetensi Teknis Masing masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah;
3. Sehubungan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Banten akan selalu mempedomani Peraturan Pemerintah tersebut;
4. Segera berkoordinasi dan konfirmasi ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi LAKIP Provinsi Banten;
5. Akan mempedomani dan mengikuti peraturan yang telah diterbitkan sesuai amanat Pergub.

- Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a. Permasalahan

Kegiatan – kegiatan dengan serapan tidak mencapai 100% pada umumnya karena ketidak hadiran dan ketidak sesuaian Narasumber yang datang sehingga terjadi efisiensi anggaran;

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Biro Bina Infrastruktur dan SDA dengan serapan 79,97% karena terdapat kelebihan biaya Transportasi pada belanja Perjalanan Dinas.

- Biro Umum
- a. Permasalahan
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan tidak dapat di realisasikan terkait dengan surat edaran Inspektorat Provinsi Banten perihal Pembayaran Honorarium Narasumber Internal ASN Provinsi Banten yang tidak dapat dibayarkan (Single Salary System) sehingga pada kegiatan tersebut honor Narasumber/Moderator tidak dapat dibayarkan. Sehingga berpengaruh besar pada persentasi capain realisasi kegiatan;
 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terkendala pada penyerapan pengadaan APK barang yang tidak di laksanakan sebesar Rp557.000.000,00;
 3. Kegiatan terdapat efisiensi pada belanja Pengadaan Lapangan Upacara dengan Efisiensi sebesar Rp150.000.000,00 dan Pengadaan Pagar Lapangan Upacara dengan Efisiensi sebesar Rp65.000.000,00;
 4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Premi Asuransi terdapat efisiensi pada beberapa belanja di antaranya sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas berjenis Land Cruiser & Nissan X Trail dengan Efisiensi sebesar Rp900.000.000,00;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Inova (9 Unit) dengan Efisiensi sebesar Rp320.000.000,00;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Golf dengan Efisiensi sebesar Rp120.000.000,00;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Inova (2 unit) dengan Efisiensi sebesar Rp430.000.000,00.
 5. Pada tolok ukur kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan dan tolok ukur kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan tahun 2017 terkait dengan surat edaran Inspektorat perihal Pembayaran Honorarium Narasumber Internal ASN Provinsi Banten yang tidak dapat dibayarkan (Single Salary System) sehingga pada kegiatan tersebut honor Narasumber/Moderator tidak dapat dibayarkan.

- Biro Administrasi Pembangunan Daerah
- a. Permasalahan
1. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah
 2. Adanya perubahan/pergeseran kode rekening di tiap kegiatan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan
 3. penerapan SOTK baru sehingga perlu adanya pemahaman terhadap pola/penerapan yang lebih matang.
 4. Efisiensi sebesar Rp1.614.543.999,00 dari Honorarium Non PNS, Pelengkapan Peserta, Makan minum kegiatan, Belanja internet, Dekorasi, Promosi dan Publikasi, kegiatan yang dikontraktualkan (Fullboard, Kajian) dan tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, SPPD Koordinasi untuk Tim Pokja ULP tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada usulan dari tiap OPD Provinsi Banten.
- b. Solusi
1. Dalam pencapaian sasaran mikro dan sasaran stratejik yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, walaupun capainnya belum optimal, namun umumnya telah terlaksana dengan baik.
 2. Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kedepan, yaitu :
 - Peningkatan pengelolaan dengan mengoptimalkan SDM dan Pelatihan - pelatihan sehingga tercipta peningkatan kinerja aparatur;
 - Dalam pencapaian sasaran tahunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perlu adanya kecermatan dan perencanaan yang baik sehingga Capaian Program dan Kegiatan dapat di Optimalkan.

- Biro Kesejahteraan Rakyat
- a. Permasalahan
 1. Kegiatan – kegiatan dengan serapan tidak mencapai 100% pada umumnya karena ketidak hadiran dan ketidak sesuaian Narasumber yang dating sehingga terjadi efisiensi anggaran;
 2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdapat beberapa fungsi/kewenangan yang tumpang tindih dengan OPD lain;
 3. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Biro yang membantu Asisten Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerja Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo maka untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan data yang falid dan up date dari OPD teknis diatas.
- b. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut yaitu Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu melakukan koordinasi lanjutan dengan OPD Teknis dan terkait dengan penyediaan data pembangunan dan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan.
- Biro Pemerintahan
- a. Permasalahan

Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2017, diantaranya :

 1. Penyerapan anggaran baru dapat di laksanakan pada bulan Maret 2017;
 2. Terjadinya pergantian pimpinan (Kepala Biro Pemerintahan) di sebabkan telah berakhirnya masa tugas Kepala Biro Pemerintahan pada akhir bulan Mei 2017. Pengangkatan Plt (Pelaksana Teknis) Kepala Biro Pemerintahan baru di lantik per 1 September 2017. Secara umum Biro Pemerintahan hanya dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta penyerapan anggarannya selama 7 Bulan;

3. Kedua hal tersebut yang mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di buat sebelumnya.

b. Solusi

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan *Cash Budgetting* yang telah ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. Terkait dengan pensuin ASN seharusnya sudah dapat di prediksi jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.

- Badan Penghubung

a. Permasalahan

1. SPJ kantor (Badan) harus 75 % bila belum mencapai 75 % belum dapat mengajukan GU (ganti uang) sehingga kegiatan yang sudah selesai belum dapat mengajukan kembali karna harus menunggu kegiatan lain selesai;
2. Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat berpengaruh pada serapan anggaran sehingga berdampak tidak terserapnya masing-masing objek rekening Kegiatan;
3. Proses Penatausahaan Keuangan melalui data base SIMDA online masih terkendala of line sehingga menghambat

pertanggungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akuntansi neraca dan aset;

4. Penentuan GU UP per SKPD dihitung dengan formulasi $UP\ SKPD = 1/12 \times (\text{Jumlah pagu Belanja Langsung SKPD setelah dikurangi belanja LS})$, tidak berdasarkan Estimasi pengeluaran alokasi triwulan pada anggaran kas yang sesuai dengan Pergub Banten 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2017 sehingga GU UP nilainya tidak sesuai dengan Anggaran Kas/ROK;
5. Pada Kegiatan Sarasehan belum ada tindak lanjut nota dinas kegiatan;
6. Konsep Pembinaan dan Rakor mahasiswa, serta Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan tujuan dan masalah dan Tufoksi serta PP 18 Tahun 2016;
7. Pengelolaan Wisma tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan Penyelenggaraan Pemda agar disesuaikan dengan fungsinya;
8. Belum ada tolak ukur kegiatan terkait untuk investasi yang sesuai tupoksi Badan Penghubung;
9. Hubungan Kelembagaan kurang efektif apabila jadi satu dengan promosi dan investasi karna di Badan Penghubung lain Hubungan Kelembagaan jadi Fasilitas Pimpinan dan Pelayanan Masyarakat;
10. Badan penghubung yang mengkoordinasi. Tugas badan penghubung mengikuti event promosi? Uraian tugas . Belum ada tolak ukur kegiatan terkait untuk investasi yang sesuai tupoksi;
11. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKA, KL, DPA, ROK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
12. Terdapat harga satuan Pergub tidak sesuai dengan kondisi harga di Jakarta;
13. Belum semua OPD Provinsi Banten melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
14. Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
15. Belum ada database investor/pengusaha dalam dan luar negeri;

16. Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jati diri Provinsi Banten;
17. Beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan Penghubung, para Kepala Badan sepatutnya perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
18. Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
19. Belum tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
20. Belum Optimalnya kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder;
21. Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
22. Belum terbentuknya Tim Koordinasi terkait dengan Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di Pemerintah Pusat;

b. Solusi

1. Dilakukan Penentuan SPJ kantor (Badan) harus 75% agar dapat mengajukan GU (ganti uang) sehingga kegiatan tidak harus menunggu kegiatan lain selesai;
2. Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat dilakukan seharusnya pada masa Penyusunan RKA sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diserap sesuai dengan DPA;
3. Kedepan Tim SIMDA Provinsi Banten dan Dinas Kominfo agat meningkatkan peran aktifnya untuk keberlangsungan SIMDA online sehingga tidak terjadi kembali SIMDA of line yang dapat menghambat proses pertanggungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akuntansi neraca dan aset;
4. Penentuan GU UP per SKPD agar ditinjau dan dihitung kembali sehingga proses ganti uang dan kesedian anggaran tiap OPD dapat mendukung kelancaran kegiatan;
5. Akan diupayakan dan berkoordinasi dengan mitra OPD yang menangani produk kesenian;
6. Perlu dibuat Nota Dinas tindak lanjut hasil narasumber Instrumen sebagai bahan perencanaan kegiatan saresahan dan pengendalian

dan evaluasi kegiatan. Sehingga ada kesinambungan pertemuan. Topik/Tema yang berkaitan dengan tupoksi/IKU Badan Penghubung

7. Agar dilakukan mapping antara Badan Penghubung dengan ARTP terkait kegiatan (lihat PP nomor 18 tahun 2016).
8. Pengelolaan Wisma tidak berhubungan dengan nomenklatur penyelenggaraan pemerintah daerah di Sarankan tupoksinya dipindah/ dirubah;
9. Perlu adanya Koordinasi dan mapping antara badan penghubung dan dinas penanaman modal terkait pembagian tugas;
10. Akan dibuat rumusan, usulan kajian dan konsep tentang hubungan kelembagaan, dan usulan tentang kerjasama pembangunan. Serta hubungan kelembagaan dipindahkan ke fasilitasi penyelenggaraan;
11. Agar ditampilkan kegiatan yang terkait dengan investasi serta dikoordinasikan, mapping dengan dinas terkait;
12. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran serta kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
13. Kedepan harga satuan harus disesuaikan dengan kondisi di Jakarta dan dimasukkan dalam Pergub;
14. Kedepan akan dilaksanakan dan koordinasi untuk semua SKPD Provinsi Banten agar melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
15. Kedepan akan diupayakan data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
16. Kedepan akan diupayakan data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
17. Perlu ditinjau kembali beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan Penghubung, para Kepala Badan Penghubung sepakat perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
18. Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
19. Badan Penghubung harus menyusun SOP semua Kinerja;
20. Harus mengoptimalkan kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Stakeholder;

21. Perlu membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan;
22. Akan mengusulkan Tim Koordinasi tentang Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di Pemerintah Pusat.

2.3.5 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp18.797.378.100,00 dan realisasi sebesar Rp15.222.005.477,00 atau sebesar 80,98% dengan realisasi fisik sebesar 95,00%.

Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran tidak mencapai target, antara lain : disebabkan adanya efisiensi anggaran dari nilai kontrak, nilai barang dan jasa, efisiensi perjalanan dinas, penginapan, honorarium pengawas, honorarium panitia dan honorarium narasumber;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor disebabkan pengadaan kendaraan roda 2 yang dibatalkan, dan Alat komunikasi;
3. Kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur disebabkan tolok ukur kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup waktu;
4. Kegiatan penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah disebabkan pengeluaran anggaran disesuaikan dengan adanya kasus-kasus yang masuk di Inspektorat.

2.3.6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Pemerintahan, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp41.637.536.400,00 dan realisasi sebesar Rp35.140.132.543,00 atau sebesar 84,40% dengan realisasi fisik sebesar 96,28%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, adalah:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan

Desain Pemetaan Tenaga Pendidik, pada kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, tolok ini direncanakan dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun dikarenakan tidak terjadi Kesepakatan Antara UPI dan Pemprov Banten.

b. Solusi

Agar dimasukkan kembali pada tolok ukur ini kedalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

2.3.7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan didukung oleh 4 program dan 103 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Umum Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp199.717.953.995,00 dan realisasi sebesar Rp126.055.220.948,00 atau sebesar 63,12% dengan realisasi fisik sebesar 98,56%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan, adalah:

- Badan Pendapatan Daerah

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
2. Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2017, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya pengunduran diri

penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah *out of stock/discountinue* atau *indent*;

3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang jumlah anggaran sebesar Rp2.413.963.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.765.380.291,00 atau 73,13%, rendahnya penyerapan diakibatkan :

- Penyediaan BBM. Terdapat kekeliruan penganggaran belanja BBM yang tidak sesuai standar satuan harga Provinsi Banten maka PPTK berinisiatif merubah alokasi belanja tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran namun usulan pergeseran tidak terlaksana, maka belanja tersebut disesuaikan dengan proses perubahan anggaran yang menyebabkan jadwal pelaksanaan berubah dan proses penyerapan hanya terdapat waktu 2 (dua) bulan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal;
- Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Jasa Listrik. Karena terdapat rencana menaikkan kapasitas daya listrik pada UPT Pandeglang dari daya 1005.000Kwa menjadi 135.000Kwa, maka PPTK berinisiatif mengalokasikan dalam usulan pergeseran anggaran TA.2017 namun usulan pergeseran tidak terlaksana yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal;
- Belanja Perjalanan Dinas. karena dibulan Januari terdapat pengisian jabatan pada UPT Pandeglang yang bertambah jumlah pegawainya sehingga jumlah belanja perjalanan dinas memerlukan penyesuaian, maka PPTK berinisiatif mengusulkan usulan pergeseran anggaran TA. 2017 namun usulan pergeseran tidak terlaksana proses penyerapan hanya terdapat waktu 2 (dua) bulan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal.

4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung jumlah anggaran sebesar Rp350.580.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.631.035,00 atau 27,28%, rendahnya penyerapan diakibatkan :

- Terdapat rehab gedung kantor pada kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan karena pada bulan Mei 2017 pegawai pada

UPT Rangkasbitung menempati gedung baru dan gedung tersebut dan gedung tersebut belum bisa dilakukan renovasi/rehab karena masih dalam pemeliharaan pihak ketiga;

- Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan dinas yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan kendaraan;
- Efisiensi Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan alat perlengkapan kantor tersebut.

5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja jumlah anggaran sebesar Rp1.975.566.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.366.094.320,00 atau 69,15%, rendahnya penyerapan diakibatkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2017, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses *e-Catalog*, adanya pengunduran diri penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja modal alat kantor lainnya dan alat rumah tangga lainnya pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah out of stock atau indent.

6. Beberapa kegiatan terdapat efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perauran Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2017 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel, meliputi :

- Kegiatan Keberatan dan Restitusi jumlah anggaran sebesar Rp268.728.000,00 dan realisasi sebesar Rp159.696.000,00 atau 59,43%;
- Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi jumlah anggaran sebesar Rp172.265.000,00 dan realisasi sebesar Rp98.131.000,00 atau 56,97%, adapun kendala lain yang mengakibatkan rendahnya penyerapan yaitu :

- Efisiensi terkait adanya kebijakan pimpinan untuk tidak melaksanakan rapat di luar kantor (Hotel), uang saku peserta tidak diserap karena peserta yang hadir hanya dari OPD Provinsi Banten dan perlengkapan peserta berupa tas tidak diserap karena tidak sesuai dengan SSH;
 - Efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2017 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel.
 - Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota jumlah anggaran sebesar Rp301.104.000,00 dan realisasi sebesar Rp162.420.500,00 atau 53,94%, adapun kendala lain yang mengakibatkan rendahnya penyerapan yaitu adanya kebijakan tidak diperbolehkannya Rapat di luar Kantor, narasumber maksimal 4 orang yang bisa di realisasikan, dan Perlengkapan Peserta yang tidak boleh di serap; dan
7. Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Lain-lain di wilayah UPT DPPKD Cilegon jumlah anggaran sebesar Rp22.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.100.000,00 atau 79,74%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
- Dalam pendataan pemakaian BBM pada SPBU dan sektor industri, anggaran penyerapan hanya sebesar 79,74% dikarenakan dalam pengeluaran uang saku pendataan pemakaian BBM Nilai Penyerapan Anggaran sebesar Rp14.600.000,00 sehingga sisa yang tidak terserap sebesar Rp4.600.000,00 yang diakibatkan terdapat kesalahan perhitungan alokasi anggaran kas perubahan yang seharusnya untuk dua bulan tetapi diinput satu tahun anggaran.

b. Solusi

Solusi yang dapat ditempuh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, antara lain:

1. Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan;
 2. Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan;
 3. Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi;
 4. Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat; dan
 5. Perlu dilakukan koordinatif planning dalam penyusunan anggaran sesuai kebutuhan yang rasional.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a. Permasalahan
- Permasalahan yang dihadapi pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Daerah di beberapa kegiatan yang serapan anggaran dibawah 85,00%. hal ini disebabkan karena efisiensi, yaitu: Efisiensi pada Belanja Jasa Narasumber, Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Efisiensi dari kontrak/LS, Belanja Sewa Tempat/Ruang Rapat (Pelaksanaan kegiatan dikantor), Belanja Sertifikasi, dan Pelaksanaan kegiatan diluar kendali Pengguna Anggaran (Verifikasi DPA 2018, Bimtek Simral, Sosialisasi Perda BMD).
- b. Solusi
- Solusi dari permasalahan yang terjadi pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Daerah, antara lain:
1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 2. Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA;
 3. Meningkatkan Kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara berkesinambungan, dan Meningkatkan kualitas kegiatan.

- Biro Umum

a. Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten dengan pekerjaan Pengadaan Tanah Rencana Waduk Sindang Heula lanjutan seluas ±71,1 Ha terlaksana 89 bidang dengan luas 225,054 m² (22,5 Ha). Sisanya tidak terlaksana karena lahan seluas 35 Ha dalam sengketa hukum dan 13,6 Ha dengan bukti kepemilikan tanah belum jelas.

b. Solusi

1. Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2018 untuk sisa tanah seluas 48,6 Ha yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2017;
2. Melakukan pembayaran melalui konsinyasi terhadap tanah sengketa pada tahun anggaran 2018.

2.3.8 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp11.573.227.500,00 dan realisasi sebesar Rp8.091.089.055,00 atau sebesar 69,91% dengan realisasi fisik sebesar 89,53%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pengadaan Mesin Absensi untuk SMA/SMK se-Provinsi Banten pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengesahan DPPA Tahun 2017 ditetapkan dengan waktu yang sedikit sehingga jadwal pelaksanaan tidak memungkinkan untuk direalisasikan, sehingga rencana pemasangan jaringan dan instalasi mesin absensi bagi SMA/SMK se-Provinsi Banten pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pegawai tidak dapat dilakukan mengingat teknis pelaksanaan sesuai perencanaan tidak mungkin dilakukan;

2. Kegiatan Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai pada tolok ukur Pengukuran kinerja pegawai terkendala oleh pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan sistem kinerja, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk memahami secara utuh system kinerja dimaksud;
3. Dalam rangka pengoptimalisasi pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional penganggaran kegiatan tersebut dirasionalisasi, akan tetapi pada perubahan anggaran tidak dirubah sehingga berdampak pada penyerapan anggaran;
4. Pelaksanaan beberapa tolok ukur seperti Pelantikan dan Sidang Baperjakat Jabatan Struktural tidak dilaksanakan pada Tahun 2017 sedangkan komponen lainnya terdapat rasionalisasi terkait dengan pemberian honorarium bagi ASN Provinsi Banten;
5. Pelaksanaan Seleksi Perpindahan PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena Badan Kepegawaian Daerah masih menganalisa terkait kebutuhan pegawai didasarkan oleh Analisis Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

b. Solusi

1. Proses perencanaan harus dianggarkan pada DPA murni sehingga ketersediaan waktu sangat banyak;
2. Harus ada sosialisasi, pendampingan dari Tim terkait OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pengelolaan Manajemen Jabatan Fungsional dilingkungan Pemprov Banten akan lebih efektif dijalankan dengan cara langsung berkoordinasi dengan OPD terkait karena karakteristik di tiap-tiap OPD berbeda-beda;
4. Dalam penyusunan anggaran kedepan harus mempedomani ketentuan yang berlaku.

2.3.9 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Teknis Substantif, Fungsional, Manajemen dan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terdapat efisiensi kontrak, efisiensi honor narasumber dan efisiensi uang saku peserta. Selain itu terdapat peserta yang dipanggil untung mengikuti Diklat, namun tidak menghadiri baik dikarenakan ketidaksesuaian kriteria, mendapatkan penugasan lain, maupun tidak ada konfirmasi ketidakhadiran;
2. Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan, terdapat perubahan alokasi anggaran jumlah peserta Diklat dari Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang;
3. Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor , Terdapat efisiensi kontrak dan anggaran yang tidak digunakan pada honorarium pejabat/ pokja/ panitia pengadaan barang dan jasa, belanja premi asuransi BMD, dan belanja pajak BBNKB;
4. Pada kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Terdapat efisiensi dan anggaran tidak digunakan karena; adanya perubahan harga, stok yang masih tersedia, pemakaian dibawah perkiraan anggaran;
5. Sedangkan pada kegiatan lainnya secara umum, terdapat efisiensi baik pada kontrak, honorarium narasumber, maupun anggaran yang tidak digunakan karena efisiensi.
6. Pengesahan APBD Perubahan pada triwulan ke-empat (Bulan November) berimplikasi pada padatnya kegiatan di dua bulan terakhir, sedangkan sarana dan prasarana kediklatan khususnya kelas dan asrama masih terbatas;
7. Kurangnya dukungan OPD untuk mengirimkan peserta Diklat sesuai dengan kompetensi/ Kriteria yang dipersyaratkan;
8. Tingginya Kebutuhan Diklat melalui usulan yang disampaikan baik oleh OPD Provinsi Banten, BKPP/BKPSDM Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten, maupun Lembaga/ Instansi Vertikal belum seiring dengan ketersediaan sarana utama maupun sarana penunjang Kediklatan;

9. Rencana Operasional Kegiatan (ROK) belum dapat di laksanakan Tepat waktu.

b. Solusi

1. Telah dilakukan perbaikan dalam tahapan perencanaan kegiatan Diklat Tahun 2018 melalui proses *e-planning* (SIMRAL), sehingga diharapkan serapan antara realisasi sejalan dengan perencanaan;
2. Telah dibuat kalender penyelenggaraan Diklat Tahun 2018, tujuannya agar OPD dapat menyiapkan ASN yang akan mengikuti Diklat selama Tahun 2018 agar sesuai dengan peta kebutuhan kompetensi. Selain itu kalender menjadi kontrol agar terdapat kesesuaian antara jadwal Diklat dengan ketersediaan pengajar, ketersediaan ruang kelas dan asrama;
3. Selesaiannya pembangunan Gedung Assessment, Gedung Kantor, Asrama VIP dan Gedung Ruang makan/ dapur menjadi solusi keterbatasan sarana;
4. Diharapkan BKD memberikan teguran kepada Intansi yang tidak mengirimkan Peserta Diklat yang telah ditetapkan;
5. OPD diharapkan melakukan proses seleksi internal sebelum mengirimkan peserta Diklat, agar sesuai dengan kompetensi, ketentuan serta kebutuhan;
6. Terkait perubahan peraturan terkait penyelenggaraan Diklat yang bersifat Dinamis baik pada Diklat Pim, Diklat Teknis dan Fungsional akan dilakukan konsultasi dan koordinasi baik dengan LAN, BPSDM Kemendagri, serta lembaga terkait.

2.3.10 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten; dan Kajian Relevansi Pendidikan Kejuruan Melalui Strategi Kemitraan SMK Industri di Provinsi Banten, pada kegiatan Penelitian Sosial, Pemerintah, Ekonomi, Dan Pembangunan, tolok ini direncanakan dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama

dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun dikarenakan tidak terjadi Kesepakatan Antara UPI dan Pemprov Banten.

b. Solusi

Agar dimasukkan kembali pada tolok ukur ini kedalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.